

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2	TUJUAN.....	I-2
1.3	DASAR HUKUM.....	I-2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
2.1	TINJAUAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TAHUN SEBELUMNYA	II-1
2.1.1	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-1
2.1.2	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	II-1
2.1.3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran	II-2
2.1.4	Pertumbuhan PDRB.....	II-3
2.1.5	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	II-3
2.1.6	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	II-4
2.1.7	Pendapatan per Kapita.....	II-5
2.1.8	Inflasi.....	II-6
2.1.9	Penduduk Miskin	II-6
2.1.10	Pengangguran Terbuka	II-7
2.1.11	Indeks Pembangunan Manusia	II-8
2.1.12	Nilai Tukar Petani.....	II-9
2.1.13	Distribusi Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson).....	II-10
2.1.14	Distribusi Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)	II-11
2.2	PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2016.....	II-12
2.2.1	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-12
2.2.2	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	II-12
2.2.3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran	II-13
2.2.4	Pertumbuhan PDRB.....	II-14
2.2.5	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	II-14
2.2.6	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	II-15
2.2.7	Inflasi.....	II-16
2.2.8	Indeks Pembangunan Manusia	II-17
2.2.9	Penduduk Miskin	II-17
2.2.10	Pengangguran Terbuka	II-18
2.2.11	Nilai Tukar Petani.....	II-20
BAB III	ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN APBD TAHUN 2017	III-1
3.1	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM R-APBN T.A. 2017	III-1
3.1.1	Tinjauan Perkembangan Ekonomi Makro Nasional sampai dengan Triwulan II 2016	III-1
3.1.2	Tantangan dan Prospek Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016	III-2
3.1.3	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN T.A. 2017	III-3
3.2	TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 – 2017	III-4
3.3	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD T.A. 2017	III-9
3.3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBD T.A. 2017	III-9
3.4	ASUMSI LAIN YANG DIGUNAKAN DALAM APBD T.A. 2017	III-9
3.4.1	Pendapatan Asli Daerah.....	III-9
3.4.2	Kondisi Infrastruktur Jalan Daerah	III-9

3.4.3	Nilai Tukar Petani.....	III-10
BAB IV	KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	IV-1
4.1	POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	IV-1
4.2	PENDAPATAN DAERAH.....	IV-2
4.2.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Darerah.....	IV-2
4.2.2	Target Pendapatan Daerah.....	IV-3
4.2.3	Upaya Mencapai Target Pendapatan Daerah.....	IV-4
4.2.4	Kebijakan Belanja Langsung Tak Langsung	IV-5
4.3	PEMBIAYAAN DAERAH.....	IV-72
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	IV-73
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	IV-73
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 – 2015 (Miliar Rupiah).....	II-1
Tabel II-2	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015	II-2
Tabel II-3	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2010 – 2015	II-2
Tabel II-4	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010)	II-4
Tabel II-5	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010).....	II-5
Tabel II-6	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 (Ribu Jiwa)	II-7
Tabel II-7	Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung Tahun 2010 – 2015 (Persen).....	II-8
Tabel II-8	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2015.....	II-8
Tabel II-9	Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Lampung Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014 – 2015	II-9
Tabel II-10	Ringkasan Indikator Ekonomi Makro sampai dengan Tahun 2015	II-12
Tabel II-11	PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah).....	II-12
Tabel II-12	Struktur PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar harga Berlaku (persen).....	II-13
Tabel II-13	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2011 – Triwulan II 2016	II-13
Tabel II-14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen).....	II-15
Tabel II-15	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung – Sisi Permintaan.....	II-15
Tabel II-16	Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy).....	II-17
Tabel II-17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah	II-18
Tabel II-18	Pengangguran Terbuka menurut Kota-Desa Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016.....	II-19
Tabel II-19	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Februari 2014 – Februari 2016 (Ribu)	II-19
Tabel II-20	Komposisi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016 (Persen)	II-20
Tabel III-1	Asumsi Makro dalam R-APBN 2017 (Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2016)	III-4
Tabel III-2	Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Ekonomi Provinsi Lampung.....	III-9
Tabel IV-1	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung T.A. 2017.....	IV-4
Tabel IV-2	Belanja Tak Langsung dalam Struktur APBD Tahun 2016	IV-7
Tabel IV-3	Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	IV-8

Tabel IV-4	Belanja Langsung Berdasarkan SKPD Merujuk pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.....	IV-22
Tabel IV-5	Belanja Langsung Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017	IV-24
Tabel IV-6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Proritas Pembangunan Nasional.....	IV-48
Tabel IV-7	Pembiayaan Daerah dalam Struktur APBD Tahun 2017.....	IV-72
Tabel IV-8	Pembiayaan Daerah dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2017.	IV-73
Tabel IV-9	Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2017	IV-73

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015	II-3
Grafik II-2 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2010- 2015 (ADHB, Juta Rupiah)	II-5
Grafik II-3 Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010 – 2015 (Persen).II-6	
Grafik II-4 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung Tahun 2012 – 2015	II-7
Grafik II-5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2011 – 2015 (Persen)	II-8
Grafik II-6 IPM Provinsi Lampung dan Indonesia	II-9
Grafik II-7 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2015	II-10
Grafik II-8 Indeks Williamson Provinsi Lampung dan Indonesia (33 Provinsi) .	II-10
Grafik II-9 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2011 – 2015....	II-11
Grafik II-10 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional (% yoy) ..	II-14
Grafik II-11 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional	II-16
Grafik II-12 IPM Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-17
Grafik II-13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional	II-17
Grafik II-14 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional...	II-18
Grafik II-15 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2016	II-20
Grafik III-1 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2016	III-10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tahapan-proses perencanaan dengan tahapan-proses penganggaran dalam pembangunan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara simultan telah mengamanatkan bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2017, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

Sebagaimana diketahui, tahun 2017 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi dan menjaga sinergi capaian target pembangunan daerah dan nasional, tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah “Memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera” dengan prioritas pembangunan yang diarahkan pada: 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; 2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan; 3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan; 4) Pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; 5) Mengembangkan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM; 6) Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur; 7) Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan 8) Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan kesiagaan penanggulangan bencana.

Lebih lanjut, mengingat bahwa: (1) *secara substansi*, Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta asumsi penyusunan APBD yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro, dan (2) *secara normatif*, hasil pembahasan dan kesepakatan KUA akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD; maka Kebijakan Umum APBD (KUA) mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan penganggaran

pembangunan daerah maupun pencapaian rencana pembangunan pemerintah daerah.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2017 bertujuan:

1. Menjaga kesinambungan antara tahapan-proses perencanaan pembangunan daerah dengan tahapan-proses penganggaran pembangunan daerah;
2. Menyampaikan uraian tentang kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD;
3. Menjembatani pelaksanaan tugas fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan acuan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2017.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 TINJAUAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TAHUN SEBELUMNYA

2.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2015 yang diukur berdasarkan PDRB Harga Berlaku mencapai Rp. 253,162 triliun rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 231,008 triliun rupiah. Menurut Harga Konstan (ADHK 2010) maka PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai Rp199,525 triliun rupiah meningkat dari tahun 2014 yang sebesar Rp189,809 triliun rupiah.

Tabel II-1 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 - 2015 (Miliar Rupiah)

PDRB	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ADH BERLAKU (Miliar rupiah)	150 560, 84	170 046, 79	187 348, 82	204 402, 79	231 008, 43	253.162, 54
ADHK TH 2010 (Miliar rupiah)	150 560, 84	160 437, 50	170 769, 21	180 636, 66	189 809, 46	199.525, 42

2.1.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Lampung menurut kelompok lapangan usaha pada tahun 2015 didominasi tiga kelompok usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (31,86 persen); Industri Pengolahan (19,31 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,74 persen).

Meninjau data pengamatan perekonomian Lampung pada periode tahun 2010 s.d. 2015 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (31-34%); kelompok Industri Pengolahan (17-19%); dan kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10-12%); yang diikuti dengan peran kelompok Konstruksi (8-9%); kelompok Pertambangan dan Penggalian (5-6%); serta kelompok Transportasi dan Pergudangan (4-5%). Hasil pengamatan terhadap kecenderungan kontribusi kelompok lapangan usaha pada periode 2010 s.d. 2015, menunjukkan bahwa:

- Kontribusi kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menurun; dari sekitar 34% di tahun 2010 dan 2011 terus mengalami penurunan menjadi sekitar 32% di tahun 2014 dan 2015.
- Kontribusi kelompok Industri Pengolahan cenderung meningkat; dari sekitar 17% di tahun 2010 menjadi 19% di tahun 2015.
- Kontribusi kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung menurun; dari sekitar 12% di tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 10-11% di akhir tahun periode pengamatan.
- Secara umum, kontribusi kelompok lapangan usaha yang lain belum menuju pada pergeseran yang cukup mencolok; kecuali kontribusi pada kelompok Transportasi dan Pergudangan yang menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari sekitar 4% di tahun 2011 terus meningkat menjadi lebih dari 5% di tahun 2015.

Tabel II-2 Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,56	34,67	33,81	33,16	32,69	31,86
Pertambangan dan Penggalian	5,9	6,03	6,02	6,39	6,3	5,67
Industri Pengolahan	17,18	17,14	17,51	17,65	18,03	19,31
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,11
Konstruksi	9,01	8,75	8,82	8,73	8,9	8,49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,21	12,11	11,7	11,33	11,01	10,74
Transportasi dan Pergudangan	4,22	4,06	4,13	4,49	4,65	5,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,28	1,35	1,4	1,45	1,51
Informasi dan Komunikasi	3,32	3,35	3,54	3,54	3,45	3,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	2,06	2,28	2,36	2,26	2,2
Real Estat	2,76	2,79	2,76	2,73	2,83	2,87
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,06	3,26	3,35	3,54	3,69
Jasa Pendidikan	2,41	2,62	2,77	2,84	2,84	2,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,91	0,93	0,93	0,92	0,97
Jasa Lainnya	0,88	0,85	0,81	0,79	0,8	0,87
Total PDRB	100	100	100	100	100	100

2.1.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, perekonomian Lampung pada periode 2010-2015 ditopang oleh konsumsi rumah tangga (sekitar 60 persen), diikuti dengan PMTB pada kisaran 29-32 persen dan konsumsi belanja pemerintah pada kisaran 8 – 9 persen, dengan *share* kegiatan ekspor yang lebih rendah dibanding kontribusi kegiatan impor selama beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, struktur perekonomian menurut kelompok pengeluaran pada periode pengamatan tersebut belum banyak berubah secara signifikan.

Tabel II-3 Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2010 – 2015

KOMPONEN PENGELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga	59,55	60,55	61,14	61,26	60,1	60,53
Konsumsi LNPRT	1,26	1,25	1,24	1,27	1,3	1,36
Konsumsi Pemerintah	8,29	8,54	8,85	9,01	8,96	9,68
PMTB	29,18	30,78	32,08	31,71	30,74	30,08
Perubahan Inventori	0,87	0,97	0,69	0,98	0,39	0,25
Ekspor	38,87	40,63	48,63	51,12	46,35	44,62
Impor	38,02	42,72	52,63	55,35	47,84	46,53
Total PDRB	100	100	100	100	100	100,00

2.1.4 Pertumbuhan PDRB

Sejak tahun 2012 laju perekonomian Lampung relatif mengalami perlambatan. Pada tahun tersebut laju ekonomi Lampung tercatat 6,44 persen, padahal di tahun sebelumnya Lampung tumbuh 6,56 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam periode pengamatan. Tren melambatnya pertumbuhan ekonomi Lampung tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional, di mana ekonomi Lampung pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,08 persen dari yang sebelumnya sebesar 5,78; sementara hal yang sama juga terjadi pada skala nasional dimana ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen dari 5,58 persen pada tahun sebelumnya.

Di tahun 2015 perekonomian Lampung memperlihatkan tren peningkatan dari 5,08 di tahun 2014 menjadi 5,13 pada tahun 2015. Pertumbuhan tersebut lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada skala nasional dimana pertumbuhan ekonominya justru terus mengalami perlambatan sebesar dari 5,02 di tahun 2014 menjadi 4,79 pada tahun 2015.

Grafik II-1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015



2.1.5 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Mengamati pertumbuhan tahunan dan pertumbuhan rata-rata sektor sekunder selama kurun waktu 2011 s.d 2015, pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,20 persen. Meskipun cukup dinamis, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh dengan rata-rata 6,39 persen; dan pertumbuhan rata-rata lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,80 persen. Sementara, pertumbuhan sektor primer seperti kelompok Transportasi dan Pergudangan; Akomodasi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan; kesemuanya tumbuh secara rerata pada kisaran 7 hingga 11 persen, di atas pertumbuhan rata-rata sektor sekunder.

Tabel II-4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010)

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,38	3,93	4,63	3,39	3,66	4,20
Pertambangan dan Penggalian	9,75	5,61	11,47	0,93	4,20	6,39
Industri Pengolahan	4,97	9,32	7,74	4,51	7,48	6,80
Pengadaan Listrik dan Gas	8,43	15,15	10,97	8,78	3,60	9,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,13	4,82	-1,57	7,49	2,47	3,67
Konstruksi	5,74	6,44	3,58	7,7	2,29	5,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	5,24	2,97	5,98	1,98	4,74
Transportasi dan Pergudangan	8,2	10,35	7,35	7,65	11,67	9,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	9,47	5,82	7,73	8,96	8,12
Informasi dan Komunikasi	12,34	13,38	9,37	8,84	10,84	10,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	11,7	7,18	2,18	3,56	7,80
Real Estat	7,02	8,29	9,97	7,7	4,49	7,49
Jasa Perusahaan	15,73	13,9	11,99	8,05	7,97	11,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,17	6,16	2,49	8,23	9,79	5,57
Jasa Pendidikan	13,68	4,5	5,21	11,07	6,65	8,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,38	11,62	7,36	5,11	6,81	7,66
Jasa Lainnya	4,63	1,79	3,42	8,13	8,51	5,30
Pertumbuhan PDRB	6,56	6,44	5,78	5,08	5,13	

Meskipun tidak menyebabkan gangguan berarti terhadap perekonomian daerah karena sisi permintaan masih akan tetap tumbuh; namun ketimpangan struktur ekonomi pada sektor sekunder dan primer tersebut dapat mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak riil. Secara singkat, fenomena tersebut memberi sinyal bahwa efisiensi dan produktivitas lebih dominan terjadi pada sektor sekunder dan tersier, sementara efisiensi dan produktivitas pada sektor primer bergerak lebih lambat.

2.1.6 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Merujuk pada data pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran, perkembangan data statistik pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa di tahun 2015 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,59 persen, melambat jika dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 6,16 persen. Konsumsi Pemerintah tumbuh progresif dari 2,51 persen menjadi 13,06 persen. Selanjutnya, pertumbuhan investasi yang direpresentasikan oleh PMTB tumbuh sebesar 4,16 persen yang berarti melambat jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,66 persen. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor juga mengalami perlambatan; di tahun 2015 kegiatan ekspor dan impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar -3,72 persen dan -2,43 persen, melambat jika dibanding tahun 2014 yang tumbuh sebesar 2,41 persen dan 3,34 persen.

Tabel II-5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010)

KOMPONEN PENGELUARAN	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga	4,87	6,32	5,81	6,16	5,59
Konsumsi LNPRT	5,66	5,84	3,88	6,57	7,04
Konsumsi Pemerintah	6,74	6,18	4,2	2,51	13,06
PMTB	11,68	9,35	3,81	5,66	4,16
Perubahan Inventori	-26,51	-3,34	-49,93	-52,19	20,84
Ekspor	12,46	25,71	6,75	2,41	-3,72
Impor	13,12	27,83	4,57	3,34	-2,43
Pertumbuhan PDRB	6,56	6,44	5,78	5,08	5,13

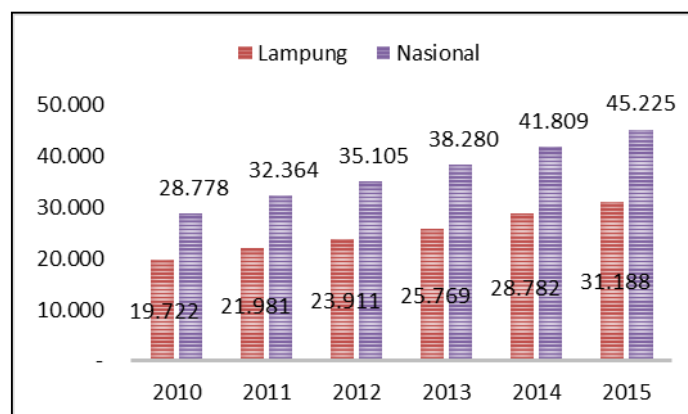
Sepanjang periode pengamatan 2011 hingga 2015, terdapat beberapa data statistik yang patut menjadi pokok pengamatan, diantaranya:

- Di tengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan PMTB masih tumbuh secara positif. Bahkan diakhir tahun pengamatan, konsumsi pemerintah tumbuh progresif dan merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sepanjang periode pengamatan.
- Kinerja ekspor dan impor yang cenderung terus menurun. Pada sisi ekspor, meskipun terdapat faktor eksternal yang berpengaruh, namun setidaknya keadaan tersebut dapat memberi sinyal kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan daya saing produk lokal agar terus dapat berkompetisi dalam kancah global. Pada sisi impor, menurunnya kegiatan impor dapat mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kegiatan ekonomi lokal yang melambat mengingat bahwa masih terdapat kegiatan ekonomi daerah yang menggunakan bahan baku ataupun peralatan yang diperoleh dari luar negeri.

2.1.7 Pendapatan per Kapita

Angka PDRB perkapita digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat secara umum dalam suatu wilayah tertentu. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa pada periode tertentu.

Grafik II-2 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2010- 2015 (ADHB, Juta Rupiah)



Seiring dengan peningkatan PDRB Provinsi Lampung, maka PDRB per Kapita dari kurun waktu 2010 s.d 2015 juga mengalami peningkatan. Di tahun 2015 PDRB per Kapita penduduk Lampung sebesar Rp31,188 juta meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih di bawah rata-rata PDRB per Kapita secara nasional yang tercatat Rp45,225 juta.

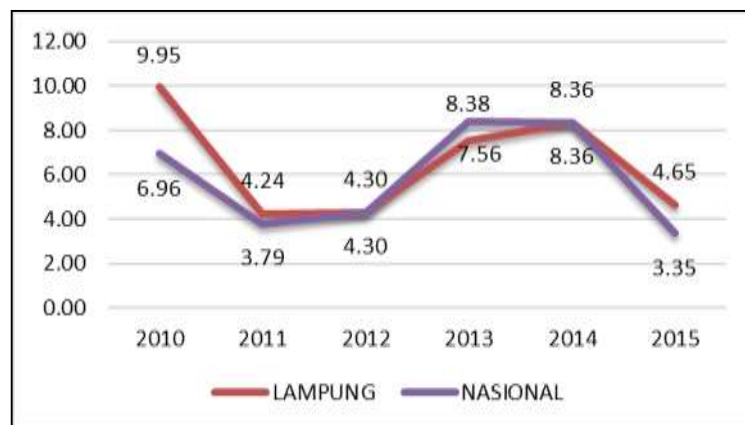
2.1.8 Inflasi

Mengaitkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Grafik II-1) dan tingkat inflasi (Grafik II-3) tampak bahwa pada tahun 2014 perekonomian Lampung dan nasional mengalami tekanan laju inflasi, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi melambat sementara laju inflasi merangkak naik melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2014 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Lampung tercatat sebesar 5,08 persen dan LPE nasional 5,02 persen; dengan tingkat inflasi daerah sebesar 8,36 persen setara dengan tingkat inflasi nasional di tahun yang sama.

Di tahun 2015, tercatat bahwa inflasi Lampung sebesar 4,65 persen. Meskipun terdapat dinamika dan momentum kenaikan harga yang disebabkan oleh faktor distribusi, cuaca dan musiman maupun permintaan komoditas pada kelompok *volatile food*, namun penurunan tingkat inflasi secara keseluruhan pada periode tahun ini diimbangi oleh menurunnya inflasi pada kelompok *administered price* dan *core inflation*/inflasi inti.

Membandingkan tingkat inflasi daerah dan nasional pada dua tahun terakhir; tampak bahwa menurunnya tingkat inflasi daerah dari 8,36 persen di tahun 2014 menjadi 4,65 persen di tahun 2015 sejalan dengan inflasi nasional yang menurun dari 8,36 persen di tahun 2014 menjadi 3,35 persen di tahun 2015.

Grafik II-3 Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010 – 2015 (Persen)



2.1.9 Penduduk Miskin

Memperhatikan Grafik II-4 penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode 2010 s.d. 2015 terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 13,53 persen yang berarti menurun dibanding dengan persentase penduduk miskin tahun-tahun sebelumnya. Namun, data statistik menunjukkan bahwa angka tersebut masih berada di atas persentase penduduk miskin secara nasional.

Grafik II-4 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung Tahun 2012 – 2015



Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli.

Tabel II-6 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 (Ribuan Jiwa)

LOKASI	2012	2013	2014	2015
Kota	237,90	222,75	224,21	197,94
Desa	981,10	911,53	919,73	902,74
Kota + Desa	1.219,00	1.134,28	1.143,93	1.100,68

Meninjau Tabel II-6 tampak bahwa penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka program-program penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada kegiatan di wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur pedesaan maupun aktivitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2.1.10 Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 5,14 persen atau sekitar 196,9 ribu orang, meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,79 persen atau sekitar 184,8 ribu orang di tahun 2014. Dalam skala nasional, TPT Provinsi Lampung pada periode tahun 2010-2015 masih berada dibawah TPT Indonesia.

Tabel II-7 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung Tahun 2010 – 2015 (Persen)

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung (%)	5,57	5,78	5,18	5,69	4,79	5,14
Indonesia (%)	7,14	6,56	6,14	6,25	5,94	6,18

Grafik II-5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2011 – 2015 (Persen)



Meninjau sebaran penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka pada periode tahun 2013-2015 (Tabel II-8) yang didasarkan pada perbandingan wilayah permukiman kota-desa, maka jumlah penduduk yang menganggur di wilayah perdesaan (*rural area*) lebih tinggi dibanding penduduk di wilayah perkotaan (*urban area*). Di tahun 2015, sebanyak 7,82 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 82,1 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (*rural area*) tingkat pengangguran tercatat 4,12 persen setara dengan 114,8 ribu orang. Fenomena ini dapat mendorong tingkat urbanisasi atau migrasi pencari kerja dari desa ke kota.

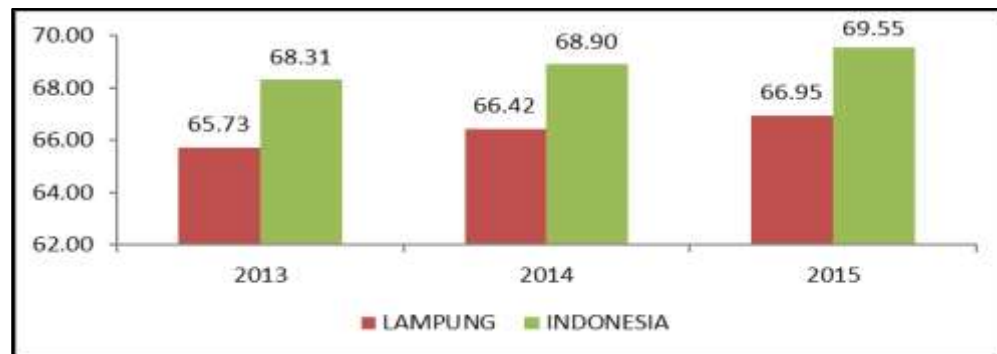
Tabel II-8 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2015

LOKASI	2013		2014		2015	
	Jumlah absolut (ribu)	Persen	Jumlah absolut (ribu)	Persen	Jumlah absolut (ribu)	Persen
Kota	81,0	8,97	65,4	6,99	82,1	7,82
Desa	128,5	4,62	119,4	4,08	114,8	4,12
Kota + Desa	209,5	5,69	184,8	4,79	196,9	5,14

2.1.11 Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode tiga tahun terakhir, IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 65,73 di tahun 2013 menjadi 66,95 di tahun 2015. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional. Oleh karenanya, untuk memacu ketertinggalan tersebut Provinsi Lampung perlu melanjutkan program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan secara konsisten.

Grafik II-6 IPM Provinsi Lampung dan Indonesia



2.1.12 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan data statistik di tahun 2015, tercatat bahwa hampir separuh atau sebesar 48,78 persen penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung berkecimpung di sektor pertanian (dalam arti luas) atau setara dengan 1,773 juta dari 3,636 juta penduduk yang bekerja.

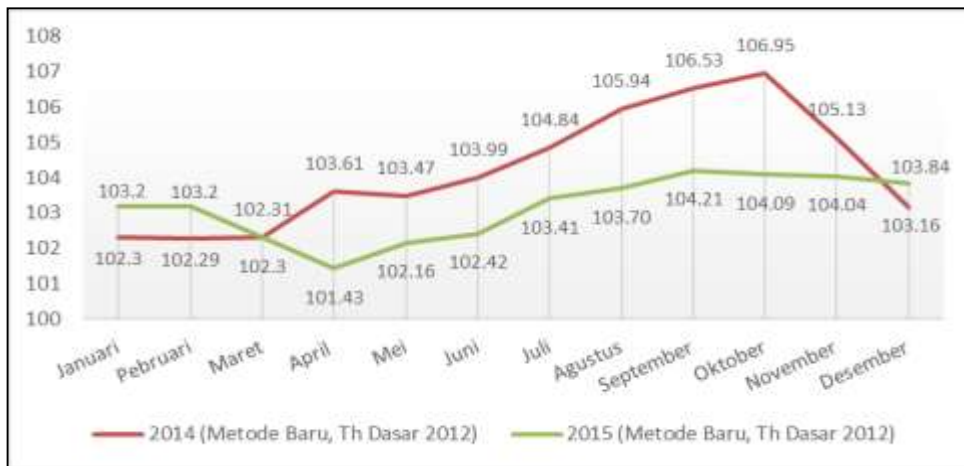
Tabel II-9 Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Lampung Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014 - 2015

Lapangan Pekerjaan (1)	2014		2015	
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	48,51	48,87	47,12	48,78
Pertambangan dan Penggalian	1,12	0,41	0,93	0,79
Industri	8,21	7,96	9,50	9,12
Listrik, Gas dan Air Minum	0,08	0,12	0,11	0,16
Konstruksi	3,57	4,98	5,27	6,13
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	19,77	18,04	18,47	18,86
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	3,51	3,88	3,78	3,39
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	1,66	1,44	1,51	1,52
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Terkait dengan hal tersebut, maka pemantauan terhadap indikator Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menjadi penting. NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat

tingkat kemampuan/daya beli petani. Rata-rata NTP di di tahun 2015 sebesar 103,84 meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 103,16. Meski masih perlu ditingkatkan, nilai NTP pada dua tahun terakhir dapat menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor pertanian secara umum masih memberi harapan yang cukup baik.

Grafik II-7 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2015

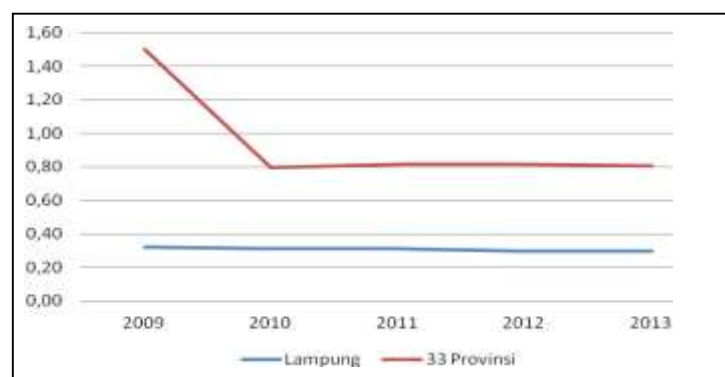


2.1.13 Distribusi Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antarwilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumberdaya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Grafik II-8 Indeks Williamson Provinsi Lampung dan Indonesia (33 Provinsi)



Indeks *Williamson* Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2009-2013 cenderung menurun. Nilai indeks 0,27 di tahun 2009 turun menjadi 0,24 di tahun 2013, masih dibawah nilai Indeks *Williamson* secara nasional. Pada tahun 2014*), Indeks Ketimpangan Wilayah Provinsi Lampung sebesar 0,23. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

2.1.14 Distribusi Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)

Ukuran Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antarkelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Pada periode tahun 2011 – 2014 Indeks Gini Provinsi Lampung secara umum menunjukkan tren yang menurun, namun pada tahun 2015 justru meningkat menjadi 0,38. Di sisi teori, Indeks Gini Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 0,38 di tahun 2015 menunjukkan tingkat ketimpangan pada “tingkat sedang” (antara 0,3 - 0,5). Nilai Indeks Gini dari 0,35 di tahun 2014 menjadi 0,38 di tahun 2015 perlu waspada dan diantisipasi agar ketimpangan tidak justru melebar. Membandingkan dengan nilai Indeks Gini nasional, maka Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada dibawah nilai Indeks Gini secara nasional yang tercatat sebesar 0,41.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antarkelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik II-9 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2011 – 2015



Dalam konteks kenegaraan, kesenjangan pendapatan antarkelompok akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam stabilitas. Oleh karenanya, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah daerah dengan upaya-upaya signifikan yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengembangkan usaha kecil dan menengah, sehingga mampu mengangkat kualitas dan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel II-10 Ringkasan Indikator Ekonomi Makro sampai dengan Tahun 2015

INDIKATOR MAKRO	TAHUN 2015	
	LAMPUNG	NASIONAL
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,13 %	4,79 %
Pendapatan per Kapita	Rp. 31,188 Juta	Rp. 42,225 Juta
Inflasi	4,65 %	3,35 %
Persentase Penduduk Miskin	13,53 %	11,13 %
Pengangguran Terbuka	5,14 %	6,18 %
Indeks Pembangunan Manusia	66,95	69,55
Nilai Tukar Petani	103,84	102,83
Ketimpangan Regional	0,23 *)	NA
Ketimpangan Antarkelompok	0,35	0,40

2.2 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2016

2.2.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Lampung pada Triwulan II 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 70,625 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 53,281 triliun.

Tabel II-11 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)

	Tw. II 2015	Tw. I 2016	Tw. II 2016
Harga Berlaku	58.221,43	66.660,41	70.625,65
Harga Konstan Tahun 2010	48.203,54	51.069,83	53.281,01

2.2.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Merujuk pada Tabel II-15, struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha pada Triwulan II-2016 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (33,88 persen); Industri Pengolahan (18,39 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,90 persen). Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pangsa sektor Industri Pengolahan; dan sektor Perdagangan Besar-Eceran/Reparasi Mobil-Sepeda Motor mengalami peningkatan. Sedangkan pangsa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara relatif masih belum banyak berubah terhadap total perekonomian di Provinsi Lampung.

Tabel II-12 Struktur PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar harga Berlaku (persen)

Komponen (1)	Trw II-2015 (2)	Trw I-2016 (3)	Trw II-2016 (4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,87	33,89	33,88
B Pertambangan dan Penggalian	5,78	5,31	5,34
C Industri Pengolahan	19,31	17,81	18,39
D Pengadaan Listrik, Gas	0,07	0,10	0,10
E Pengadaan Air	0,11	0,10	0,10
F Konstruksi	7,75	8,18	7,78
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,34	10,72	10,90
H Transportasi dan Pergudangan	4,80	5,10	5,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,53	1,52
J Informasi dan Komunikasi	3,47	3,83	3,70
K Jasa Keuangan	2,10	2,22	2,15
L Real Estate	2,82	2,90	2,86
M, N Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,46	3,60
P Jasa Pendidikan	2,60	2,83	2,72
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,98	0,96
R,S,T,U Jasa lainnya	0,85	0,86	0,85
PDRB	100,00	100,00	100,00

2.2.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, perekonomian Lampung pada periode 2011- Triwulan II 2016 ditopang oleh konsumsi rumah tangga (57,96 persen), diikuti dengan PMTB pada kisaran 29-32 persen dan konsumsi belanja pemerintah pada kisaran 8 – 9 persen. Jika selama 2011 – 2015 *share* kegiatan ekspor lebih rendah dibanding kontribusi kegiatan impor, maka pada triwulan II-2016 nilai ekspor lebih rendah dibanding impor. Secara keseluruhan, struktur perekonomian menurut kelompok pengeluaran pada periode pengamatan tersebut belum banyak berubah secara signifikan.

Tabel II-13 Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2011 – Triwulan II 2016

KOMPONEN PENGELUARAN	2011	2012	2013	2014	2015	Triwulan II - 2016
Konsumsi Rumah Tangga	60,55	61,14	61,26	60,1	60,53	57,96
Konsumsi LNPRT	1,25	1,24	1,27	1,3	1,36	1,27
Konsumsi Pemerintah	8,54	8,85	9,01	8,96	9,68	9,16
PMTB	30,78	32,08	31,71	30,74	30,08	29,20
Perubahan Inventori	0,97	0,69	0,98	0,39	0,25	0,55
Ekspor	40,63	48,63	51,12	46,35	44,62	40,03
Impor	42,72	52,63	55,35	47,84	46,53	38,16
Total PDRB	100	100	100	100	100,00	100,00

2.2.4 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2016 tercatat sebesar 5.21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5.18% (yoy) pada periode pengamatan yang sama.

Grafik II-10 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional (% yoy)



2.2.5 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Dari sisi Penawaran (Tabel II-16), pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,47 persen. Pertumbuhan sekitar 10 persen terjadi pada lapangan usaha: Jasa Keuangan (10,61 persen), Jasa Pendidikan (10,15 persen), Transportasi dan Pergudangan (10,04 persen). Selanjutnya, lapangan usaha yang tumbuh menggiat pada kisaran 5–10 persen, antara lain: Informasi dan Komunikasi (9,68 persen), Perdagangan dan Reparasi (8,89 persen), Konstruksi (8,01 persen), Real Estate (7,29), Administrasi Pemerintahan (6,22 persen), Akomodasi Makan Minum (5,68 persen) serta Jasa Kesehatan (5,68 persen). Sementara, Lapangan Usaha yang tumbuh kurang dari 5 persen, adalah: Jasa Lainnya (3,32 persen), Pertanian (3,31 persen), Pertambangan (2,55 persen), Jasa perusahaan (2,20 persen), Pengadaan Air (2,10 persen), dan Industri Pengolahan (2,06 persen).

Meninjau sumber pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang sebesar 5.21% pada triwulan II 2016 (yoy) lebih didorong oleh kinerja pada sektor: Pertanian (1,13 persen), diikuti Perdagangan dan Reparasi (1,00 persen) dan Konstruksi (0,63 persen). Selanjutnya, penyumbang sumber pertumbuhan lainnya berasal dari Transportasi dan Pergudangan (0,46 persen), serta Informasi dan Komunikasi (0,40 persen).

Tabel II-14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)

Komponen (1)	Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan	
	Trw II-2016 terhadap Trw I-2016 (2)	Trw II-2016 terhadap Trw II-2015 (3)	Trw II-2016 (y on y) (4)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,57	3,31	1,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4,62	2,55	0,15
C	Industri Pengolahan	7,68	2,06	0,37
D	Pengadaan Listrik, Gas	1,50	22,47	0,02
E	Pengadaan Air	1,33	2,10	0,00
F	Konstruksi	(0,96)	8,01	0,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan	5,92	8,89	1,00
H	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan	2,76	10,04	0,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,86	5,68	0,07
J	Informasi dan Komunikasi	0,50	9,68	0,40
K	Jasa Keuangan	1,49	10,61	0,21
L	Real Estate	2,58	7,29	0,21
M, N	Jasa Perusahaan	1,31	2,20	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	6,22	0,19
P	Jasa Pendidikan	0,06	10,15	0,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	5,68	0,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,23	3,32	0,03
PDRB		4,33	5,21	5,21

2.2.6 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan II 2016 terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,29 persen yang diikuti oleh pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,17 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 5,93 persen.

Memperhatikan porsi sumber pertumbuhannya, permintaan domestik yang berasal dari Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Tw II 2016 dengan andil sebesar 3,43%, kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 2,12 %. Sumber pertumbuhan yang berasal dari aktifitas ekspor masih tercatat negatif yaitu -0,06 %; sementara pada sisi impor sebesar 0,92 persen.

Tabel II-15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung – Sisi Permintaan

KOMPONEN	TW IV 2015 (qtq)	TW I 2016 (qtq)	TW II 2016 (qtq)	TW IV 2015 (yoy)	TW I 2016 (yoy)	TW II 2016 (yoy)	Andil TW II 2016
Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga	-0.40	0.36	2.44	4.98	5.33	5.93	3.43
Pengeluaran konsumsi LNPRT	11.45	-17.13	5.87	22.73	3.54	3.76	0.04
Pengeluaran konsumsi Pemerintah	60.97	-44.63	32.33	11.64	8.99	7.29	0.57

KOMPONEN	TW IV 2015 (qtq)	TW I 2016 (qtq)	TW II 2016 (qtq)	TW IV 2015 (yoy)	TW I 2016 (yoy)	TW II 2016 (yoy)	Andil TW II 2016
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.31	-7.01	5.19	7.36	5.61	7.17	2.12
Perubahan Inventori	-74.95	1100.28	81.83	-16.88	-21.56	11.61	0.03
Ekspor Barang dan Jasa	-7.74	-1.44	-3.19	-12.13	-12.95	-0.07	-0.06
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	23.20	-27.24	-1.05	-7.19	-13.31	2.66	0.92
PDRB	-8.38	6.51	4.33	5.33	5.05	5.21	5.21

2.2.7 Inflasi

Secara tahunan (Grafik II.11), laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung pada triwulan II 2016 (Juni 2016) tercatat sebesar 3,15% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (Maret 2016) yang sebesar 5,29% (yoy). Inflasi pada periode Tw II tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,45% (yoy). Secara makro, kondisi tersebut masih berada dalam kisaran target yang telah diasumsikan sebelumnya, yaitu sebesar 4 ± 1 %.

Grafik II-11 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional



Secara spasial, penurunan inflasi tersebut terjadi secara merata pada dua lokasi basis penghitungan, merupakan gabungan dari catatan Inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 3,21% (yoy) dan Kota Metro sebesar 2,84% (yoy).

Secara umum, menurunnya inflasi pada periode tersebut terutama bersumber dari menurunnya harga komoditas pada kelompok bahan makanan, jasa kesehatan serta kelompok transpor dan komunikasi. Kenaikan inflasi hanya terjadi pada kelompok sandang. Perbaikan infrastruktur yang dilakukan di wilayah Provinsi Lampung serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian menjadi faktor kunci sehingga pasokan bahan pangan strategis tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Tabel II-16 Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

No.	Komponen	2014				2015				2016	
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
1	Bahan makanan	6.33	8.11	5.84	9.94	8.55	12.03	11.86	8.33	10.44	5,90
2	Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	3.74	4.92	4.04	6.78	8.08	9.38	8.76	6.69	6.18	4,55
3	Perumahan	5.48	4.78	4.39	7.14	7.44	7.14	6.28	3.48	2.04	1,53
4	Sandang	1.95	2.65	0.97	0.37	2.05	3.16	4.01	4.47	2.66	3,57
5	Jasa kesehatan	7.42	6.90	6.32	7.49	6.40	11.12	10.39	10.30	9.54	4,25
6	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	3.65	3.41	6.07	9.03	9.02	8.78	4.28	5.00	4.96	4,73
7	Transpor dan komunikasi	13,98	10,33	1,29	10,59	1,97	3,78	4,97	-4,22	1,96	-1,04
	Umum	6.55	6.39	4.22	8.06	6.64	8.17	7.70	4.34	5.29	3,15

2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode tiga tahun terakhir, IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 65,73 di tahun 2013 menjadi 66,95 di tahun 2015. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional. Oleh karenanya, untuk memacu ketertinggalan tersebut Provinsi Lampung perlu melanjutkan program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan secara konsisten.

Grafik II-12 IPM Provinsi Lampung dan Nasional



2.2.9 Penduduk Miskin

Data statistik pada Maret 2016 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 14,29 persen, meningkat 0,71 persen dibanding September 2015 sebesar 13,53 persen. Angka kemiskinan Lampung pada Maret 2016 tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang tercatat 10,86 persen. Tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi pada September 2015 kembali terkoreksi pada Maret 2016. Angka kemiskinan kembali naik, meskipun jika dibandingkan kondisi Maret 2015 masih lebih rendah. Sebaliknya pada tingkat nasional angka kemiskinan mengalami penurunan menjadikan gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung kembali melebar.

Grafik II-13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional



Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan di mana 15,69 persen penduduknya berkategori miskin, sedangkan di perkotaan penduduk miskinnya 10,53 persen. Selama periode September 2015 – Maret 2016, baik perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin.

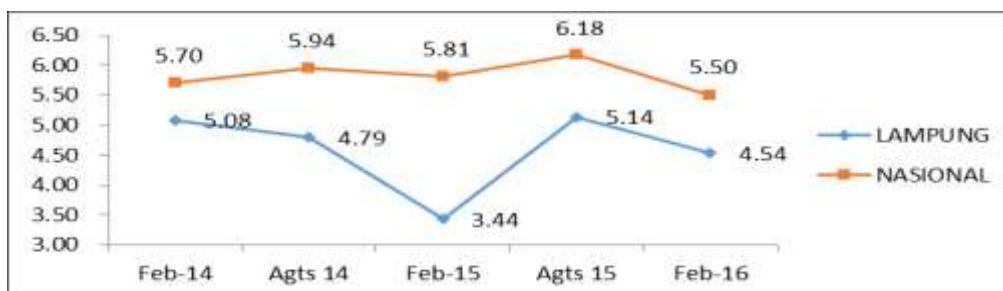
Tabel II-17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2014 (Maret)	230,63	912,28	1.142,92	11,08	15,41	14,28
2014 (Sept)	224,21	919,73	1.143,93	10,68	15,46	14,21
2015 (Maret)	233,27	930,22	1.163,49	10,94	15,56	14,35
2015 (Sept)	197,94	902,74	1.100,68	9,25	15,05	13,53
2016 (Maret)	233,39	936,21	1.169,60	10,53	15,69	14,29

2.2.10 Pengangguran Terbuka

Secara relatif angka pengangguran Lampung menunjukkan penurunan dari 5,14 persen pada Agustus 2015 menjadi 4,54 persen pada bulan Februari 2016. Angka pengangguran Lampung tersebut masih di bawah angka pengangguran nasional yang sebesar 5,5 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2015 (3,44 persen), angka pengangguran naik 1,1 persen.

Grafik II-14 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional



Berdasarkan lokasinya (Tabel II-14), perkotaan masih menjadi kantong pengangguran ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,17 persen setara dengan 81,8 ribu orang. Sementara, pengangguran di perdesaan

yang tercatat 3,51 persen setara dengan 101,7 ribu orang. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengangguran di perkotaan bertambah sebanyak 11,8 ribu orang. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran di perdesaan naik 32,2 ribu orang. Fenomena ini diduga berkaitan dengan menurunnya aktivitas sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di desa.

Tabel II-18 Pengangguran Terbuka menurut Kota-Desa Provinsi Lampung, Febuari 2015 – Febuari 2016

Daerah tempat tinggal	Febuari 2015		Agustus 2015		Febuari 2016	
	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)	Absolut (000)	TPT (%)
Perkotaan	70,0	5,70	82,1	7,82	81,8	7,17
Perdesaan	69,5	2,45	114,8	4,12	101,7	3,51
Total	139,5	3,44	196,9	5,14	183,5	4,54

Menurut sektor lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 48,23 persen. Disusul dua lapangan pekerjaan lain yakni berturut-turut perdagangan/rumah makan dan jasa akomodasi (19,47 persen) serta jasa kemasyarakatan/sosial dan perorangan (11,72 persen). Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari 75 persen tenaga kerja di Lampung. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang dari 10 persen.

Tabel II-19 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, Febuari 2014 – Febuari 2016 (Ribu)

Lapangan pekerjaan	2014		2015		2016
	Febuari	Agustus	Febuari	Agustus	Febuari
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	1885,3	1795,2	1847,9	1773,1	1859,3
Pertambangan dan Peggalian	42,7	15,2	36,4	28,9	20,8
Industri	313,8	292,2	372,6	331,4	375,4
Listrik, Gas dan Air Minum	3,2	4,5	4,3	5,8	9,7
Konstruksi	136,6	182,9	206,6	222,9	181,2
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	756,1	662,8	724,3	685,6	750,6
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	134,4	142,6	148,0	123,4	138,9
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa perusahaan	63,5	52,8	59,3	55,1	67,3
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	518,5	525,0	521,7	409,0	451,6
Total	3824,2	3673,2	3921,2	3635,3	3854,8

Selama setahun terakhir terlihat ada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut latar belakang pendidikan. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma/sarjana) turun dari 15,61 persen menjadi 13,38 persen. Sebaliknya,

pengangguran yang mengenyam pendidikan rendah (SMP ke bawah) naik turun dari 41,26 persen menjadi 13,38 persen. Sementara pada penduduk yang bekerja terlihat adanya sedikit penurunan pada pekerja yang berpendidikan rendah. Kondisi yang sama dialami oleh pekerja yang berpendidikan tinggi. Sementara pekerja yang berpendidikan SMA (umum/kejuruan) mengalami peningkatan yakni dari 23,73 persen naik menjadi 24,76 persen.

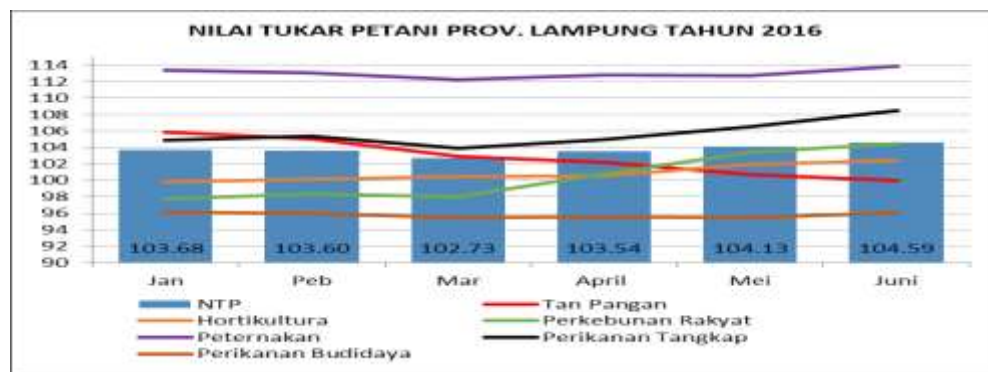
Tabel II-20 Komposisi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari 2015 – Februari 2016 (Persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Bekerja			Pengangguran		
	Feb 2015 (2)	Agt 2015 (3)	Feb 2016 (4)	Feb 2015 (5)	Agt 2015 (6)	Feb 2016 (7)
<= SD	46,07	46,37	44,77	23,26	16,30	29,70
SMP	22,29	23,42	22,84	18,00	19,80	18,88
SMA Umum	14,29	16,61	15,94	25,67	39,49	24,41
SMA Kejuruan	9,44	7,14	8,82	17,46	15,57	13,63
Diploma I/II/III	2,34	1,89	2,00	3,86	2,28	1,35
Universitas	5,57	4,57	5,62	11,74	6,56	12,02
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.2.11 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Rata-rata NTP pada Tw II 2016 tercatat sebesar 104,1 meningkat dibanding Tw I 2016 yang sebesar 103,3.

Grafik II-15 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2016

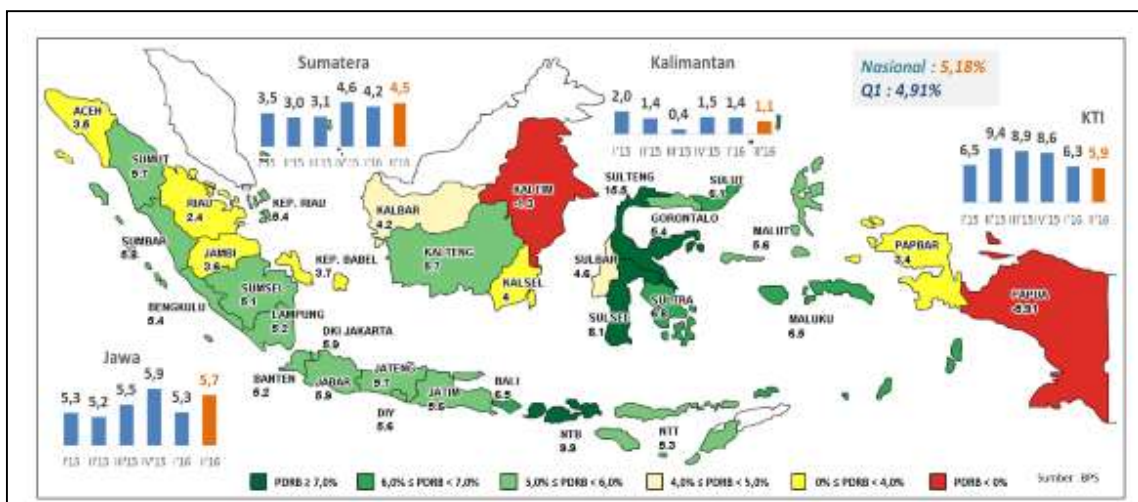


BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN APBD TAHUN 2017

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM R-APBN T.A. 2017

3.1.1 Tinjauan Perkembangan Ekonomi Makro Nasional sampai dengan Triwulan II 2016

Pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga triwulan II 2016, tercatat sebesar 5,18%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,92%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini terutama didorong oleh meningkatnya ekonomi Sumatera dan Jawa. Hampir seluruh provinsi di dua wilayah tersebut tumbuh meningkat, kecuali Aceh. Di sisi lain, perekonomian Kalimantan dan KTI tumbuh melambat bersumber dari melambatnya laju ekonomi beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat; serta kontraksi cukup dalam yang terjadi di Kalimantan Timur dan Papua.



Pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pada triwulan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang tumbuh meningkat seiring pergeseran masa Ramadhan yang menjadi lebih banyak berada pada triwulan II, serta didukung membaiknya daya beli masyarakat karena Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, perbaikan ekspor dan konsumsi pemerintah juga menopang pertumbuhan pada triwulan II 2016. Namun, masih terkontraksinya sektor pertambangan dan melambatnya industri pengolahan menahan pertumbuhan, terutama untuk wilayah di luar Jawa.

Perkembangan inflasi nasional sepanjang triwulan II 2016 terjaga dalam level yang cukup rendah. Realisasi inflasi pada akhir triwulan II 2016 (Juni 2016), yang merupakan periode Ramadhan, secara agregat tercatat sebesar 3,45% (yoy). Realisasi inflasi pada periode Ramadhan ini bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya dalam 5 tahun terakhir. Secara umum, terkendalnya inflasi di sepanjang periode triwulan II 2016 dipengaruhi oleh masa panen padi yang berlangsung di sejumlah daerah sentra produksi dengan capaian yang lebih baik dibanding periode panen tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung

minimalnya kendala distribusi di tengah mulai meningkatnya permintaan memasuki periode Ramadhan. Realisasi inflasi (yoy) yang terendah pada akhir triwulan II 2016 terjadi di wilayah Jawa (3,14%), diikuti Sumatera (3,71%), Kawasan Timur Indonesia (3,94%), dan Kalimantan (4,87%).

Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat pasokan pangan. Upaya menambah pasokan secara serentak di seluruh daerah dapat mengatasi kenaikan permintaan yang terjadi di seluruh daerah pada masa Ramadhan 2016. Upaya Pemerintah untuk memperkuat pasokan ditempuh antara lain melalui intensifnya upaya peningkatan produksi pangan, pemenuhan pasokan dari berbagai sumber, termasuk impor, didukung berlanjutnya program gerai maritim dan tol laut, serta pelaksanaan operasi pasar beras yang diikuti koordinasi kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pasar murah di bulan Ramadhan tahun ini tidak hanya dilakukan untuk komoditas beras, minyak goreng, dan gula pasir, namun juga komoditas penyumbang inflasi lainnya, seperti pasar murah telur ayam di Padang, pasar murah cabai merah di Banten, dan operasi pasar daging sapi oleh Bulog yang dilakukan secara serentak di seluruh daerah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016

Tantangan Ekonomi Nasional 2016

Pemulihan ekonomi di 2016 masih dibayangi tantangan yang cukup berat karena tingginya ketidakpastian global, kinerja fiskal yang terbatas, serta masih terbatasnya optimisme sektor swasta terhadap prospek pemulihan perekonomian. Hasil referendum di Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa serta masih lemahnya ekonomi Tiongkok yang diikuti terbatasnya perbaikan harga komoditas global menambah tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut berimbas pada terbatasnya perbaikan ekonomi daerah, terutama daerah yang mengandalkan ekspor komoditas primer (SDA). Di sisi lain, hal itu juga berdampak pada turunnya pendapatan fiskal daerah serta terbatasnya peningkatan kinerja korporasi karena turunnya pendapatan usaha.

Selain itu, percepatan penyerapan belanja daerah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah perlu menjadi perhatian. Sampai dengan akhir triwulan II 2016, saldo dana milik Pemda di perbankan di berbagai daerah masih cukup besar, yang secara agregat mencapai Rp219,5 triliun. Efisiensi anggaran pemerintah guna menjaga kesinambungan fiskal yang ditempuh melalui kebijakan pemotongan anggaran belanja APBN sebesar Rp. 133,8 triliun, akan turut mempengaruhi stimulus fiskal daerah. Pemotongan itu terdiri dari pengurangan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Walaupun demikian, masih cukup besarnya cadangan SiLPA yang dimiliki Pemda di berbagai daerah diperkirakan masih mampu meredam dampak dari upaya efisiensi belanja tersebut.

Sementara itu, langkah pengendalian inflasi masih dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan struktural. Masih terbatasnya kapasitas produksi pangan, struktur pasar yang belum efisien, dan infrastruktur logistik yang belum memadai merupakan tantangan terbesar bagi stabilitas harga pangan dalam jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap

faktor iklim dan cuaca, serta besarnya disparitas harga antara produsen-konsumen maupun antarwilayah. Di samping itu, masih terbatasnya kapasitas dan akses transportasi di beberapa daerah juga kerap mendorong kenaikan inflasi yang bersumber dari angkutan, terutama pada periode *peak seasons*.

Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, strategi kebijakan yang terintegrasi dan koordinasi yang intensif antara pusat-daerah perlu secara konsisten dilakukan dan diperkuat. Langkah koordinasi diarahkan pada upaya untuk mempercepat implementasi pembangunan berbagai infrastruktur utama yang mampu menjadi akselerator bagi kinerja perekonomian daerah di tahun 2016.

Prospek Ekonomi Nasional Tahun 2016

Perkembangan terkini indikator perekonomian nasional di berbagai daerah mengindikasikan prospek perekonomian pada 2016 tumbuh lebih baik dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015, meski sedikit lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Perbaikan perekonomian terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera. Meski demikian, perbaikan perekonomian masih dibayangi risiko belum optimalnya penyerapan belanja daerah di tengah upaya penghematan belanja pemerintah yang antara lain berupa pemotongan dana transfer ke daerah. Selain itu, masih tingginya ketidakpastian ekonomi global yang berimbas pada ekspor daerah diperkirakan turut membatasi kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Melihat berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2016 diperkirakan berada di kisaran 4,9 – 5,3% (yoy), sedikit lebih rendah dari kisaran sebelumnya, yaitu 5,0 – 5,4% (yoy).

Di sisi inflasi, perkembangan terkini di berbagai daerah mengindikasikan, hingga akhir tahun 2016, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan secara agregat berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $4\% \pm 1\%$. Masih terbatasnya kenaikan harga komoditas global serta masih rendahnya harga minyak dunia berdampak pada rendahnya tekanan inflasi dari faktor eksternal. Demikian halnya dengan tekanan permintaan domestik yang diperkirakan masih belum kuat sejalan dengan ekspektasi perbaikan ekonomi yang masih terbatas dari pelaku ekonomi domestik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatalkan kenaikan tarif listrik non-subsidi untuk daya 900VA juga turut mendukung prakiraan rendahnya inflasi di akhir 2016.

3.1.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN T.A. 2017

Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meski masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat.

Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,7 persen di tahun 2016. Sementara itu di sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi kontributor utama perekonomian nasional pada tahun 2017. Selain itu, belanja pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Upaya tersebut didorong pula oleh dampak kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diterapkan mulai tahun 2016 yang akan mendorong investasi di sektor riil melalui repatriasi kepemilikan dana yang ada di luar negeri. Seiring dengan membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2017, adalah:

Tabel III-1 Asumsi Makro dalam R-APBN 2017 (Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2016)

INDIKATOR MAKRO	ASUMSI R-APBN 2017
Pertumbuhan ekonomi	5,3 persen
Tingkat Inflasi	4,0 persen
Nilai tukar rupiah rata-rata	Rp13.300/USD
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan	5,3 persen
Harga minyak mentah Indonesia rata-rata	USD 45/ barel
<i>Lifting</i> minyak rata-rata	780 ribu barel per hari;
<i>Lifting</i> gas rata-rata	1.150 ribu barel setara minyak per hari

3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 - 2017

Dari sisi eksternal perkembangan ekonomi global sampai dengan saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lambatnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, meskipun dalam beberapa hari terakhir terdapat sentimen positif dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan banyak pihak. Masih lesunya pemulihan ekonomi global tersebut menyebabkan harga komoditas global masih cenderung rendah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan misalnya OPEC yang mengurangi produksinya dalam rangka mendongkrak harga minyak dunia, mulai stabilnya harga karet, dan kopi, sedangkan untuk harga batu bara masih dalam tren menurun. Hal ini akan memengaruhi kinerja ekonomi domestik melalui jalur perdagangan dan keuangan.

Di sisi internal, tantangan terhadap permasalahan ekonomi daerah yang masih terus mengemuka setiap tahun adalah: peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi yang terkendali, peningkatan kualitas infrastruktur daerah,

mengurangi pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, meningkatkan investasi dan ekspor, pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum optimal, memperkuat kemandirian fiskal serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok, termasuk pula pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- Dalam rangka pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, permasalahan terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar seperti jalan maupun energi listrik menjadi penghambat utama bagi tumbuhnya investasi. Masih banyaknya kerusakan jalan dan minimnya ketersediaan sumber energi listrik menyebabkan inefisiensi perekonomian karena tingginya biaya logistik dan operasional. Lebih lanjut, ketidakseimbangan tersedianya infrastruktur antar wilayah di Lampung menyebabkan perekonomian daerah hanya berkembang pada wilayah tertentu.
- Daya saing SDM Lampung tergolong rendah. Kualitas penduduk Lampung yang diukur berdasar indikator IPM telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, bila dibanding dengan daerah lain (di tingkat regional Sumatera maupun pada lingkup nasional) tampak bahwa capaian pembangunan SDM di Lampung masih cukup tertinggal.
- Ketahanan pangan merupakan isu strategis pembangunan yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian dan menjadi perhatian pemerintah. Data statistik ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hampir separuh dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bekerja pada lapangan usaha pertanian. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian pada lima tahun terakhir menggambarkan kecenderungan tingkat pertumbuhan yang menurun. Terdapat banyak aspek yang perlu pembenahan, baik disisi SDM pelaku pertanian, infrastruktur pertanian, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi, pengembangan pasar; memerlukan dukungan lintas bidang secara berkelanjutan. Lebih lanjut, stabilisasi harga produk pangan perlu terus dikawal mengingat bahwa tingkat harga pangan sangat terkait dengan tingkat inflasi (*volatile food*) dan stabilitas perekonomian secara umum. Kenaikan harga beras, kedelai, daging, bawang merah, cabai, dan telur dapat menjadi faktor menurunnya tingkat konsumsi dan gizi masyarakat terutama penduduk berpenghasilan rendah.
- Hingga tahun terakhir pengamatan data statistik, tingkat pengangguran terbuka berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan persentase penduduk miskin di Lampung masih di atas angka rata-rata nasional. Pengangguran berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Terbukanya lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan perekonomian dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada.
- Ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD. Sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah masih menitikberatkan pada perolehan pajak dan retribusi daerah. Untuk membangun kemandirian fiskal daerah (yang diindikasikan dengan indikator rasio pajak) dalam membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah yang ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah masih butuh waktu. Sampai saat ini

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan masih cukup besar. Meskipun terbatas, pemerintah daerah terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak untuk mendorong kemandirian fiskal. Di tengah kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan, target-target penerimaan daerah akan diproyeksikan secara lebih realistis.

- Lampung memiliki objek wisata yang telah dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada periode empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Agar tak kehilangan momentum, strategi, dan fokus pengembangan pariwisata daerah perlu terus dilanjutkan untuk mendorong tumbuhnya investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan daerah, ditengah kelesuan ekonomi nasional dan global yang sedang berlangsung.
- Dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah daerah secara konsisten perlu mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang akan memasuki pasar tenaga kerja agar dapat bersaing dan menjadi pelaku ekonomi di negeri sendiri. Untuk mampu menarik investasi, pembenahan SDM tersebut perlu disertai pula dengan pembenahan berbagai faktor pendukung seperti infrastruktur, penyediaan lahan, dan iklim investasi yang kondusif.
- Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pemanfaatan sumber daya alam yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sedapat mungkin menghindari konflik sosial, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta mengurangi kesenjangan/ketimpangan. Selain upaya-upaya penegakan hukum, perencanaan pembangunan perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih dini dan intensif, sehingga pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2016 – 2017

- **Pengeluaran konsumsi rumah tangga** masih mendominasi pertumbuhan ekonomi di Lampung. Hal ini didorong oleh masih adanya pendapatan siap pakai (*disposable income*) yang bersumber dari sektor keuangan sebagaimana tercermin dari meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan dan terjadinya inflasi pada tingkat yang rendah.
- **Pengeluaran konsumsi pemerintah** pada tahun 2016 diperkirakan sedikit melambat sejalan dengan penundaan pencairan DAU yang secara total (Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu) mencapai sekitar Rp284 miliar. Upaya efisiensi dan relokasi sejauh ini telah cukup baik dilakukan dan diharapkan berdampak minimal terhadap pertumbuhan sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi. Dengan perkembangan tersebut, konsumsi pemerintah pada tahun 2016 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017, kondisi fiskal diperkirakan belum membaik secara signifikan sehingga berdampak terhadap ruang ekspansi fiskal yang masih terbatas, konsumsi pemerintah di 2017 hanya akan tumbuh sedikit lebih tinggi dari tahun 2016.

- **Kegiatan investasi** yang diperkirakan masih akan tumbuh cukup tinggi di 2016 dan berpotensi tumbuh tinggi di tahun 2017. Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Bandar Radin Inten II, pembangunan beberapa pembangkit tenaga gas (PLTG) di Sribawono, Sutami, Labuhan Maringgai; pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Rajabasa, Ulubelu, dan Suoh; dan tersedianya regulasi daerah tentang pengembangan industri dapat menjadi pendorong kegiatan investasi khususnya investasi bangunan di tahun mendatang. Sebaliknya, **investasi nonbangunan** dalam bentuk mesin-mesin diperkirakan belum mengalami peningkatan yang berarti sejalan dengan kondisi dunia usaha yang saat ini sedang fokus pada konsolidasi internal menghadapi lesunya perekonomian. Hal ini terkonfirmasi dari hasil *liaison* yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung di mana sebagian besar pelaku usaha belum melakukan ekspansi usaha dan hanya melakukan investasi dalam bentuk pemeliharaan mesin rutin. Langkah Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong penerapan program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diharapkan dapat mendorong minat dunia usaha untuk memperluas usahanya di Provinsi Lampung.
- **Dari sisi ekspor**, masih relatif lambatnya pemulihan ekonomi di negara tujuan utama ekspor Lampung seperti Tiongkok, India, dan Italia berdampak terhadap masih lemahnya permintaan dunia sehingga pertumbuhan volume ekspor di Provinsi Lampung belum membaik secara signifikan. Namun demikian, mulai stabilnya beberapa harga komoditas ekspor khususnya komoditas perkebunan yang merupakan komoditas unggulan Lampung memberikan prospek perbaikan kinerja ekspor ke depan. Sementara itu, **kinerja impor** diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan percepatan proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung. Meningkatnya kinerja impor juga didorong oleh masih tumbuhnya konsumsi rumah tangga dan kinerja di sektor industri pengolahan.
- **Secara sektoral**, penggerak ekonomi Lampung masih bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama yakni sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Namun demikian, **sektor pertanian** diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas unggulan Lampung seperti singkong (*share* terhadap sektor pertanian mencapai sekitar 40%) mengalami penurunan harga yang cukup tajam mencapai sekitar 62% dari tahun sebelumnya berdampak signifikan terhadap penurunan daya beli petani/pengusaha singkong. Berdasarkan hal tersebut, sektor Pertanian di tahun 2017 diperkirakan tumbuh melambat. Namun demikian, sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menstabilkan harga singkong dan pangan nasional maka pada tahun 2017, meski terbatas sektor Pertanian diperkirakan akan tetap tumbuh.
- **Sektor Industri Pengolahan** akan tetap tumbuh cukup tinggi sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik terhadap subsektor makanan dan minuman yang menjadi basis industri pengolahan di Lampung. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sektor industri pengolahan cenderung sedikit melambat. Hal ini terkonfirmasi dari hasil *liaison* dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI

Provinsi Lampung menunjukkan bahwa utilisasi kapasitas di sektor industri cenderung menurun. Dengan gambaran tersebut maka kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh moderat di tahun 2017.

- Di **sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Perbaikan infrastruktur transportasi yang cukup signifikan seperti jalan dan pelabuhan menjadi pendorong perbaikan kinerja di sektor perdagangan. Selain itu, kemajuan informasi dan teknologi juga turut mendorong meningkatnya perdagangan antardaerah ini. Demikian juga upaya dari sejumlah produsen otomotif dan sepeda motor yang menjual produk baru (*downspect*) dengan harga yang lebih murah dalam rangka menraik konsumen. Dengan peran tersebut maka kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2017 masih dapat tumbuh sedikit dibanding 2016.

Secara keseluruhan, PDRB Provinsi Lampung di tahun 2016 diperkirakan dapat tumbuh lebih baik dibanding 2015, sedangkan untuk tahun 2017 PDRB Provinsi Lampung diperkirakan masih berada pada kisaran yang sama dengan tahun 2016, yakni berada pada kisaran 5,2% - 5,5% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang cenderung tumbuh moderat, **laju inflasi** di Provinsi Lampung pada tahun 2016 diperkirakan masih akan terkendali pada level yang cukup rendah. Dari sisi suplai, kondisi pasokan bahan pangan diperkirakan tetap terjaga disertai oleh ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali. Hal ini tercermin dari produksi padi yang jauh lebih baik, bahkan pengadaan beras oleh BULOG melebihi targetnya dan telah mengirim surplus beras dari Provinsi Lampung ke provinsi lainnya. Gejolak harga pangan yang masih perlu dicermati terkait dengan fluktuasi harga cabai merah dan bawang merah. Terkait hal ini, Kantor Provinsi Lampung telah mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan klaster cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan, pengembangan kelompok tani cabai di Kabupaten Pesisir Barat, dan penajakan awal pengembangan klaster bawang merah di Kabupaten Lampung Tengah. Hal lainnya yang juga patut menjadi perhatian terkait dengan gejolak harga elpiji 3 Kg, mulai meningkatnya harga minyak, serta tingginya inflasi dari biaya pendidikan di Provinsi Lampung.

Dengan kondisi tersebut diperkirakan laju **inflasi pada tahun 2016** akan terkendali pada level yang cukup rendah, dan cenderung berada di batas bawah kisaran target inflasi Provinsi Lampung yang ditetapkan sebesar $4\% \pm 1\%$ (yoy). **Prospek inflasi pada tahun 2017** diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran target $4\% \pm 1\%$ (yoy), tetapi dengan level yang sedikit lebih tinggi dari tahun 2016. Beberapa hal yang menjadi risiko meningkatkan tekanan inflasi bersumber dari kelompok *administered prices* seiring dengan potensi meningkatnya harga minyak dunia yang akan berdampak terhadap penyesuaian BBM, tarif listrik, LPG, dan komoditas turunannya. Selain itu penting menjaga stabilitas harga pangan pada level yang cukup rendah yakni *single digit* di bawah 5% (yoy) karena komoditas pangan dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat apalagi mereka termasuk miskin tersebut sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Pengendalian harga pangan tersebut secara tidak langsung turut menjaga daya beli dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Lampung.

3.3 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD T.A. 2017

3.3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBD T.A. 2017

Dengan memperhatikan berbagai kondisi dan situasi baik pada skala global dan nasional di atas, maka kondisi perekonomian Provinsi Lampung tahun 2017 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel III-2 Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Ekonomi Provinsi Lampung

No.	URAIAN	Target Tahun 2017
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,5
2.	Inflasi (%)	4 ± 1
3.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	34,00
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 – 4,50
5.	Penduduk Miskin (%)	13,00
6.	IPM	68 – 69
7.	Indeks Gini	0,35
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104
9.	Pertumbuhan PAD (%)	5 – 6,5
10.	Persentase Kemandirian Jalan Provinsi (%)	75
11.	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	3 – 4
12.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	6
13.	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	5
14.	Pertumbuhan PMTB (%)	5 – 6
15.	Pertumbuhan Ekspor(%)	≥ 2,5

3.4 ASUMSI LAIN YANG DIGUNAKAN DALAM APBD T.A. 2017

3.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Penciptaan daya saing berkelanjutan merupakan perkuatan ekonomi sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah produk dan penguatan kemandirian daerah yang diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Melalui serangkaian upaya, PAD Provinsi Lampung di tahun 2017 diproyeksikan meningkat pada kisaran 5 – 6,5 persen dibandingkan tahun 2016.

3.4.2 Kondisi Infrastruktur Jalan Daerah

Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai.

Pada tahun 2016 panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung adalah 1.639,27 Km. Sampai dengan bulan Juni 2016 kondisi jalan dalam status mantap mencapai 69 persen. Berdasarkan fakta tersebut, maka pemerintah Provinsi Lampung akan terus merehabilitasi dan membangun infrastruktur jalan dengan target 75 persen dalam kondisi mantap di tahun 2017. Pada tahun-tahun ke depan kondisi tersebut akan terus ditingkatkan mengingat

infrastruktur jalan memberi korelasi positif bagi peningkatan kontribusi berbagai sektor dalam perekonomian di Provinsi Lampung.

3.4.3 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan data statistik di tahun 2015, tercatat bahwa hampir separuh atau sebesar 48,78 persen penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung berkecimpung di sektor pertanian (dalam arti luas) atau setara dengan 1,773 juta dari 3,636 juta penduduk yang bekerja. Terkait dengan hal tersebut, maka pemantauan terhadap indikator Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menjadi penting. Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Rata-rata NTP pada Tw II 2016 tercatat sebesar 104,59 meningkat dibanding Tw I 2016 yang sebesar 103,3. Meskipun pada Tw II sudah mencapai angka di atas 104,59, namun target yang diharapkan pada tahun 2017 masih pada kisaran 104. Hal ini karena melambatnya pertumbuhan sektor pertanian.

Grafik III-1 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2016



BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.1 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2017, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah **“Memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera”** yang ditempuh melalui 8 (delapan) jalur prioritas pembangunan daerah tahun 2017, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; (2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (4) Pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; (5) Mengembangkan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM; (6) Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur; (7) Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan (8) Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan kesiagaan penanggulangan bencana.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dimana alokasi pemanfaatan anggaran pembangunan tetap berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah; penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (RAPBD), yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan (*goal*) yang akan dicapai, yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4.2 PENDAPATAN DAERAH

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah.

Secara normatif, Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam hal penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah yang akan dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, maka proyeksi pendapatan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya. Secara garis besar, kebijakan pendapatan daerah ditempuh melalui:

a. Pendapatan Asli Daerah

- Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksana bidang pajak dan retribusi daerah.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah; dilakukan sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

b. Dana Perimbangan

- Secara prinsip, penganggaran **Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak** berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Mengingat bahwa Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 belum resmi ditetapkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak pada rancangan APBD

Provinsi Lampung T.A. 2017 didasarkan pada publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

- Penganggaran **Dana Alokasi Umum (DAU)** dalam Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Mengingat bahwa Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU Tahun Anggaran 2017 belum resmi ditetapkan, maka penganggaran Dana Alokasi Umum pada rancangan APBD Provinsi Lampung T.A. 2017 didasarkan pada publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Penganggaran **Dana Alokasi Khusus (DAK)** dalam Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Mengingat bahwa Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum resmi ditetapkan, maka penganggaran Dana Alokasi Khusus pada rancangan APBD Provinsi Lampung T.A. 2017 didasarkan pada publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dianggarkan dan dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

4.2.2 Target Pendapatan Daerah

Merujuk pada data histori perkembangan perekonomian daerah dan Pendapatan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya, tampak bahwa Perekonomian Daerah dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menunjukkan tren yang meningkat. Sejalan dengan proyeksi perekonomian yang menuju pada arah perbaikan dan dukungan regulasi pemerintah yang terus berupaya menjaga kesinambungan pendapatan negara, Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 diproyeksikan meningkat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel IV-1 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung T.A. 2017

	URAIAN	R- APBD 2017
	PENDAPATAN	6,723,785,171,614.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,649,215,474,000.00
1	HASIL PAJAK DAERAH	2,394,300,000,000.00
2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	5,706,996,000.00
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	28,456,956,000.00
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	220,751,522,000.00
	DANA PERIMBANGAN	4,031,511,697,614.00
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	157,179,635,400.00
2	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK	65,919,749,000.00
3	DANA ALOKASI UMUM	1,906,179,170,214.00
4	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	205,923,000,000.00
5	DANA ALOKASI KHUSUS NON-FISIK	1,696,310,143,000.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43,058,000,000.00
1	PENDAPATAN HIBAH	17,558,000,000.00
2	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7,500,000,000.00
3	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMDA LAINNYA	18,000,000,000.00

4.2.3 Upaya Mencapai Target Pendapatan Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

4.1 BELANJA DAERAH

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas belanja.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan: konkuren yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Sementara, belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk implikasi terhadap penganggaran belanja pemerintah daerah. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, bahwa pada bulan Maret 2016 Pemerintah Provinsi Lampung telah selesai melaksanakan inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Sementara itu, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dilaksanakan sebelum bulan Oktober 2016. Disisi belanja, penyelesaian P3D perlu ditindaklanjuti dengan tambahan alokasi anggaran.

4.2.4 Kebijakan Belanja Langsung Tak Langsung

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, struktur belanja dalam APBD terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan uraian, sebagai berikut:

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- 1) **Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan

dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.

- c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Adapun rancangan belanja tak langsung ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel IV-2 Belanja Tak Langsung dalam Struktur APBD Tahun 2016

	URAIAN	RANCANGAN APBD 2017
	Belanja Tidak Langsung	4,463,638,213,614.00
1	Belanja Pegawai	1,662,465,213,614.00
2	Belanja Hibah	1,507,323,000,000.00
3	Belanja Bantuan Sosial	6,000,000,000.00
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa	1,181,000,000,000.00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa Serta Partai Politik	76,850,000,000.00
	<i>A. Belanja Bantuan Keuangan Desa</i>	<i>15,100,000,000.00</i>
	<i>B. Gerakan Membangun Desa</i>	<i>60,000,000,000.00</i>
	<i>C. Belanja Bantuan Parpol</i>	<i>1,750,000,000.00</i>
6	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000.00

2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah, penganggaran yang selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) menyebabkan anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap tugas dan fungsi (tusi) dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pada Musrenbangnas RKP Tahun 2017, bahwa anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak lagi berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata sehingga perlu memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional menjadi prioritas, sehingga kebijakan *money follow program* bisa berjalan dengan baik secara bertahap.

Berdasarkan kebijakan di atas, anggaran belanja langsung daerah dalam APBD Tahun 2017 mencapai Rp2,339,290,041,000.00 selanjutnya ditampilkan tabel mengenai distribusi belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan:

Tabel IV-3 Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
01	01		Pendidikan		
01	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2	6,453,080,000
01	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	7,450,864,000
01	01	17	Program Pendidikan Menengah	9	134,208,882,000
01	01	18	Program Pendidikan Luar Biasa	2	4,484,400,000
01	01	19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	19,949,194,400
01	01	20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7	11,192,420,400
01	01	22	Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	4	1,000,000,000
01	01	23	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	1,460,039,500
01	01	24	Program Pendidikan Tinggi	1	12,110,000,000
01	01	25	Program Kegiatan Belajar Mengajar	1	67,222,996,800
01	02		Kesehatan		
01	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	4,975,293,000
01	02	17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4	797,650,500
01	02	18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	49,600,000
01	02	19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	12,953,446,000
01	02	21	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	3,881,845,000
01	02	23	Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	2	866,932,000
01	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	12	127,428,658,150
01	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	17,435,892,850
01	02	28	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	6	47,597,919,550
01	02	30	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	5	1,815,984,000
01	02	32	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	2	184,710,835,500

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
01	02	33	Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	1,884,966,000
01	02	34	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2	728,750,000
01	02	36	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	258,320,000
01	02	37	Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	3	13,323,435,000
01	02	38	Program Pemberantasan Penyakit	1	5,589,774,000
01	02	39	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	1,748,181,000
01	02	41	Program Promosi Kesehatan	2	1,252,200,000
01	02	42	Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	1	144,600,000
01	03		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
01	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32	451,597,582,500
01	03	16	Program Perencanaan Tata Ruang	2	358,200,000
01	03	21	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30	123,960,650,000
01	03	26	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2	3,011,438,000
01	03	28	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	8	3,256,959,000
01	03	29	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11	47,795,545,000
01	03	32	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	23,700,000,000
01	03	33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3	900,000,000
01	03	34	Program pengendalian banjir	5	8,650,000,000
01	03	35	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3	2,400,000,000
01	03	36	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4	2,250,000,000
01	03	40	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	2	6,775,952,400

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
01	03	41	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	5	1,485,000,000
01	03	43	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	5	2,753,312,000
01	03	45	Pembangunan Jalan-jalan Strategis	3	29,526,774,500
01	03	46	Program Perencanaan Tata Ruang	4	3,100,000,000
01	04		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		
01	04	15	Program Pengembangan Perumahan	4	2,050,000,000
01	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9	7,850,000,000
01	04	21	Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	5	126,780,000,000
01	04	23	Program Pengembangan Data/Informasi	1	1,088,600,000
01	05		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
01	05	18	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	704,600,000
01	05	19	Program Kedaruratan dan Logistik	4	404,650,000
01	05	20	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	393,900,000
01	05	21	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	4	703,933,000
01	05	22	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4	377,202,000
01	05	23	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	9	4,675,923,800
01	06		Sosial		
01	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	200,000,000
01	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	646,000,000
01	06	17	Program pembinaan anak terlantar	4	2,861,962,000
01	06	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	1,168,000,000
01	06	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	1,365,520,500
01	06	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	435,559,000
01	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2	1,450,000,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
01	06	22	Program Keluarga Harapan	1	125,000,000
02			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
02	01		Tenaga Kerja		
02	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	7	2,721,400,000
02	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3	285,000,000
02	01	17	Program Pengembangan Kewirusahaan	1	142,500,000
02	01	18	Program Pengembangan data dan informasi	2	290,000,000
02	01	19	Program Pengembangan Hubungan Industrial	3	298,745,000
02	01	20	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	3	520,000,000
02	01	21	Program Pembinaan dan Pengujian K3	2	275,000,000
02	02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
02	02	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	3	1,545,743,000
02	02	16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking , KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	6	2,294,231,500
02	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	26,885,000
02	02	18	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	101,250,000
02	02	19	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	2	418,450,000
02	03		Pangan		
02	03	15	Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	26	3,932,808,000
02	05		Lingkungan Hidup		
02	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	1,833,500,000
02	05	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	110,000,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
02	05	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	1	110,000,000
02	05	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	462,190,300
02	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
02	06	15	Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	3	1,837,919,000
02	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3	6,677,025,000
02	07	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3	485,000,000
02	07	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6	3,275,600,000
02	07	20	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN DESA, ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN DESA	2	2,274,400,000
02	07	21	PROGRAM PEMANTAPAN KOORDINASI PROG. KHUSUS LINTAS SEKTORAL	2	350,000,000
02	07	22	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA, DAN LH	4	1,050,000,000
02	08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
02	08	25	Program Koordinasi Program Keluarga Berencana	3	900,000,000
02	09		Perhubungan		
02	09	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6	1,062,800,000
02	09	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	500,000,000
02	09	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	4	1,918,600,000
02	09	18	Program Pendidikan Non Formal	5	385,000,000
02	09	20	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3	1,062,680,000
02	10		Komunikasi dan Informatika		
02	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11	971,150,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
02	10	18	Program kerjasama informasi dan media massa	5	4,023,777,000
02	10	20	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	5,260,800,000
02	10	23	Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi	2	338,622,000
02	10	24	Program Kerjasama Antar Lembaga	1	29,997,500
02	11		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
02	11	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	1,666,080,000
02	11	16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	3	750,000,000
02	11	19	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	1	2,000,000,000
02	11	20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	3	565,298,000
02	11	21	Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5	484,982,000
02	12		Penanaman Modal		
02	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi-	5	1,534,600,000
02	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4	461,800,000
02	12	19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	5	639,200,000
02	13		Kepemudaan dan Olahraga		
02	13	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6	2,236,950,000
02	13	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	150,000,000
02	13	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5	2,063,025,000
02	13	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2	83,400,000
02	13	24	Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan	4	268,044,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RPKD TH. 2017
02	14		Statistik		
02	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi	2	123,207,000
02	15		Persandian		
02	15	02	Pengamanan Informasi Rahasia	2	433,481,000
02	15	03	Pengamanan Jaringan Komunikasi Sandi	2	244,537,000
02	16		Kebudayaan		
02	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1,521,215,000
02	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	2,468,081,900
02	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	983,500,000
02	17		Perpustakaan		
02	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4	897,200,000
02	18		Kearsipan		
02	18	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	2	91,540,000
02	18	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2	335,965,000
02	18	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	4	510,605,000
02	18	19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5	1,038,330,500
03			URUSAN PILIHAN		
03	01		Kelautan dan Perikanan		
03	01	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2	3,199,500,000
03	01	16	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	2	1,179,840,000
03	01	17	Program pengembangan budidaya perikanan	10	1,725,800,000
03	01	18	Program pengembangan perikanan tangkap	8	25,566,052,000
03	01	19	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	10	1,600,000,000
03	01	20	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2	550,380,000
03	01	21	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	2	823,130,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
03	02		Pariwisata		
03	02	15	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	4	665,000,000
03	02	16	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK	1	95,000,000
03	02	17	PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA	2	72,600,000
03	02	18	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	6,830,700,000
03	02	19	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	4,625,810,000
03	02	20	Program Pengembangan Kemitraan	6	1,303,500,000
03	03		Pertanian		
03	03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	17	3,973,000,000
03	03	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	5	601,400,000
03	03	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	28	8,096,031,000
03	03	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	24	2,122,803,000
03	03	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	7	3,953,345,000
03	03	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	5	147,600,000
03	03	26	Program Peningkatan Pelayanan Mutu	4	697,700,000
03	03	31	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	140,000,000
03	03	32	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	4	11,590,000,000
03	03	33	Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	740,000,000
03	03	34	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	2	335,000,000
03	03	35	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	5,963,000,000
03	04		Kehutanan		

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPd TH. 2017
03	04	15	Program rehabilitasi hutan dan lahan	4	3,150,000,000
03	04	16	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3	1,170,000,000
03	04	19	Program perencanaan dan pengembangan hutan	8	5,506,000,000
03	04	21	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	9	8,550,000,000
03	05		Energi dan Sumber Daya Mineral		
03	05	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	5	440,000,000
03	05	16	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2	13,578,000,000
03	05	17	Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan	2	225,000,000
03	05	18	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif	1	1,291,000,000
03	05	20	Peningkatan Kapasitas sistem Pelaporan dan Evaluasi	1	70,000,000
03	05	21	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan Geologi	4	300,000,000
03	05	22	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	2	110,000,000
03	05	24	Program Pendidikan Masyarakat	4	350,000,000
03	06		Perdagangan		
03	06	25	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6	745,800,000
03	06	27	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6	1,924,600,000
03	06	28	Program Peningkatan dan Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur	3	193,400,000
03	06	29	Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung	2	372,600,000
03	06	30	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	6	697,275,000
03	06	31	Program Pengembangan dan Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang	2	219,600,000
03	07		Perindustrian		

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
03	07	15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	8	2,139,606,000
03	07	23	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	8	1,838,132,000
03	08		Transmigrasi		
03	08	15	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	1	200,000,000
03	08	18	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	3	375,000,000
03	08	19	Program Pengembangan Kawasan KTM	2	250,000,000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
04	01		Inspektorat		
04	01	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	19	6,342,149,450
04	01	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	2	63,223,000
04	02		Perencanaan		
04	02	15	Program Pengembangan data/informasi	4	685,200,000
04	02	16	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4	696,200,000
04	02	19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	400,000,000
04	02	22	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	65,000,000
04	02	25	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	280,000,000
04	02	31	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	12	2,783,250,000
04	02	33	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	7	1,792,000,000
04	02	34	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	9	1,124,000,000
04	02	35	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1,557,000,000
04	03		Keuangan		

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
04	03	16	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	12	2,613,509,000
04	03	17	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	6	993,663,000
04	03	18	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	7	1,998,793,000
04	03	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	874,000,000
04	03	21	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	11	3,130,000,000
04	03	22	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	4	820,018,120
04	03	23	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	9	6,569,950,600
04	03	24	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	3	1,193,679,500
04	03	25	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	2,200,000,000
04	03	26	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD	3	594,790,000
04	04		Kepegawaian		
04	04	16	Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah	3	475,125,000
04	04	17	Program Pendidikan Kedinasan	1	160,000,000
04	05		Pendidikan dan Pelatihan		
04	05	19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11	4,726,767,000
04	05	20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5	623,882,600
04	06		Penelitian dan Pengembangan		
04	06	15	Penelitian dan Pengembangan	15	3,333,300,000
04	07		Penghubung		
04	07	15	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	656,500,000
04	07	16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja Bagian Umum	1	1,200,000,000
04	07	18	Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah	1	174,030,000
04	07	19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	190,000,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
04	07	20	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	688,847,500
05			URUSAN PENDUKUNG		
05	01		SETDA		
05	01	15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4	825,400,000
05	01	16	Program Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	1	250,000,000
05	01	17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	700,000,000
05	01	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	4	1,714,740,000
05	01	19	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	100,000,000
05	01	20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	17,758,979,000
05	01	21	Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	1	327,360,000
05	01	22	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	3	900,000,000
05	01	23	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	165,122,000
05	01	24	Program pembinaan & Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	98,200,000
05	01	25	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	7	1,614,378,000
05	01	26	Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah	3	385,000,000
05	01	27	Program Penataan Kelembagaan	4	478,600,000
05	01	28	Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur	3	637,800,000
05	01	29	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	7	675,000,000
05	01	30	Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah	4	329,000,000
05	01	31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	10	1,183,600,000
05	01	32	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	234,000,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05	01	33	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1	84,000,000
05	01	34	Program Pengembangan Data / Informasi	3	991,000,000
05	01	35	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	7	1,429,200,000
05	01	36	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan	1	75,000,000
05	01	38	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	5	38,339,208,000
05	01	39	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	3	1,150,000,000
05	01	40	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	800,000,000
05	01	41	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	268,500,000
05	01	42	Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung	4	3,535,000,000
05	01	43	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1	100,000,000
05	01	44	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2	405,000,000
05	01	45	Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	80,000,000
05	01	47	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial	3	2,985,750,000
05	01	49	Program kerjasama informasi dan media massa	2	807,000,000
05	01	51	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	1	375,000,000
05	01	52	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1	300,000,000
05	01	53	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	4	528,400,000
05	01	55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20	7,344,664,000
05	01	56	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2	138,200,000
05	01	57	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	1	500,000,000

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05	01	58	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa	2	331,000,000
05	02		Set DPRD		
05	02	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14	66,548,817,200
05	03		Set Korpri		
05	03	15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan	6	1,027,314,000
05	04		Non Urusan (Eks BAU)		
05	04	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	534	173,380,224,298
05	04	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166	95,904,184,732
05	04	17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5	1,501,937,500
05	04	18	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	1	136,045,200
05	04	19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53	7,819,184,900
05	04	20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	118	54,365,965,000
05	04	23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14	4,147,897,800
05	04	25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	18	3,144,126,400
05	04	26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	3	313,500,000
05	04	28	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	250,000,000
05	04	29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	13	11,470,677,000
05	04	30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	23	16,234,659,650
05	04	31	Program Ketatalaksanaan	8	931,431,500
05	04	32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4	552,600,000
05	04	33	Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	3	3,850,000,000
05	04	35	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	500,055,000
06			URUSAN KESBANGPOL		
06	01		Kesbangpol		

Kode			URUSAN / BIDANG / PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
06	01	15	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	3	400,000,000
06	01	18	Program Penanganan Konflik	2	398,000,000
06	01	20	Program Pengendalian Stabilitas Daerah	3	570,700,000
06	01	21	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	5	500,000,000
TOTAL				2,047	2,339,290,041,000

Tabel IV-4 Belanja Langsung Berdasarkan SKPD Merujuk pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

SKPD	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59	278,874,250,000
Dinas Kesehatan	49	129,500,000,000
Rumah Sakit Abdul Moeloek	13	315,341,000,000
Rumah Sakit Jiwa	32	27,700,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119	672,130,234,000
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81	243,000,000,000
Satpol PP	44	28,186,231,000
Badan Penanggulangan Bencana	36	3,500,000,000
Dinas Sosial	34	9,800,000,000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42	7,750,000,000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29	6,600,000,000
Dinas Ketahanan Pangan	44	5,000,000,000
Dinas Lingkungan Hidup	34	4,300,000,000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	3,640,919,000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	39	16,268,000,000
Dinas Perhubungan	39	8,900,000,000
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	58	16,800,000,000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	43	8,700,000,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	3,950,000,000
Dinas Pemuda dan Olahraga	37	8,624,822,000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	6,900,000,000
Dinas Kelautan dan Perikanan	52	38,504,000,000
Dinas Pariwisata	36	15,650,000,000
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	71	36,513,000,000
Dinas Perkebunan dan Peternakan	103	14,788,000,000

SKPD	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
Dinas Kehutanan	38	22,050,000,000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33	18,369,000,000
Dinas Perdagangan	53	6,050,000,000
Dinas Perindustrian	37	6,250,000,000
Inspektorat	39	8,000,000,000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75	15,839,500,000
Badan Keuangan Daerah	46	8,961,338,000
Badan Pendapatan Daerah	56	37,600,000,000
Badan Kepegawaian Daerah	43	7,450,000,000
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	41	9,000,000,000
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	34	4,600,000,000
Badan Penghubung	26	13,048,000,000
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	26	4,509,600,000
Biro Hukum	11	2,050,000,000
Biro Kesejahteraan Sosial	28	64,224,697,000
Biro Perekonomian	17	1,966,200,000
Biro Pembangunan Daerah	37	5,266,200,000
Biro Perlengkapan	29	19,107,250,000
Biro Umum	49	56,483,000,000
Biro Organisasi	39	4,069,200,000
Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik	19	10,275,600,000
Sekretariat DPRD	61	100,000,000,000
Badan Kesbangpol	33	3,200,000,000
TOTAL	2,047	2,339,290,041,000

Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tahun 2017, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada: 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; 2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan; 3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan; 4) Pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; 5) Mengembangkan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM; 6) Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur; 7) Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan 8) Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan kesiagaan penanggulangan bencana.

Alokasi belanja langsung adalah sebesar Rp2,339,290,041,000.00 tersebar pada prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-5 Belanja Langsung Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah	240	917,438,434,000
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119	672,130,234,000
01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32	451,597,582,500
01.03.21	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30	123,960,650,000
01.03.26	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2	3,011,438,000
01.03.28	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	8	3,256,959,000
01.03.40	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	2	6,775,952,400
01.03.41	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	5	1,485,000,000
01.03.43	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	5	2,753,312,000
01.03.45	Pembangunan Jalan-jalan Strategis	3	29,526,774,500
01.03.46	Program Perencanaan Tata Ruang	4	3,100,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	10,757,796,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	2,100,788,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	146,971,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	33,657,010,600
1.03.02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	236,000,000,000
01.03.29	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11	47,795,545,000
01.03.32	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	23,700,000,000
01.03.33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3	900,000,000
01.03.34	Program pengendalian banjir	5	8,650,000,000
01.03.35	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3	2,400,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPd TH. 2017
01.03.36	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4	2,250,000,000
01.04.15	Program Pengembangan Perumahan	4	2,050,000,000
01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9	7,850,000,000
01.04.21	Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	5	126,780,000,000
01.04.23	Program Pengembangan Data/Informasi	1	1,088,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	10,283,455,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,920,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	150,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	182,400,000
2.09.01	Dinas Perhubungan	39	8,900,000,000
02.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6	1,062,800,000
02.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	500,000,000
02.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	4	1,918,600,000
02.09.18	Program Pendidikan Non Formal	5	385,000,000
02.09.20	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3	1,062,680,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	3,283,120,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	437,800,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	250,000,000
4.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	408,200,000
01.03.16	Program Perencanaan Tata Ruang	1	208,200,000
04.02.33	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1	200,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPd TH. 2017
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kebudayaan	318	846,296,003,000
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59	278,874,250,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2	6,453,080,000
01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	7,450,864,000
01.01.17	Program Pendidikan Menengah	9	134,208,882,000
01.01.18	Program Pendidikan Luar Biasa	2	4,484,400,000
01.01.19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	19,949,194,400
01.01.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7	11,192,420,400
01.01.22	Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	4	1,000,000,000
01.01.23	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	1,460,039,500
01.01.24	Program Pendidikan Tinggi	1	12,110,000,000
01.01.25	Program Kegiatan Belajar Mengajar	1	67,222,996,800
02.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1,521,215,000
02.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	2,468,081,900
02.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	983,500,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	4,009,914,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,515,019,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	2,844,643,000
1.02.01	Dinas Kesehatan	49	129,500,000,000
01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	4,975,293,000
01.02.17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	639,078,000
01.02.19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	12,953,446,000
01.02.21	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	3,881,845,000
01.02.23	Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	2	866,932,000
01.02.28	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	3	45,361,504,550
01.02.30	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	4	1,256,054,000
01.02.33	Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	1,884,966,000
01.02.36	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	258,320,000
01.02.37	Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	3	13,323,435,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPd TH. 2017
01.02.38	Program Pemberantasan Penyakit	1	5,589,774,000
01.02.39	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	1,748,181,000
01.02.41	Program Promosi Kesehatan	2	1,252,200,000
01.02.42	Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	1	144,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	6,865,561,850
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	28,152,869,600
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	137,224,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	208,716,000
1.02.02	Rumah Sakit Abdul Moeloek	13	315,341,000,000
01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6	117,213,258,150
01.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	16,928,292,850
01.02.32	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	174,271,000,000
01.02.34	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	700,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	5,492,950,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	735,499,000
1.02.03	Rumah Sakit Jiwa	32	27,700,000,000
01.02.17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	158,572,500
01.02.18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	49,600,000
01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6	10,215,400,000
01.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	507,600,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
01.02.28	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	3	2,236,415,000
01.02.30	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	1	559,930,000
01.02.32	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	10,439,835,500
01.02.34	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	28,750,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	2,196,203,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	725,250,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	400,750,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	181,694,000
1.06.01	Dinas Sosial	34	9,800,000,000
01.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	200,000,000
01.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	646,000,000
01.06.17	Program pembinaan anak terlantar	4	2,861,962,000
01.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	1,168,000,000
01.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	1,365,520,500
01.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	435,559,000
01.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2	1,450,000,000
01.06.22	Program Keluarga Harapan	1	125,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,231,005,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	146,953,500
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	170,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	5,881,234,000
02.02.15	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	3	1,545,743,000
02.02.16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	5	1,694,390,500
02.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	26,885,000
02.02.18	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	101,250,000
02.02.19	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	2	418,450,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	1,591,055,900
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	346,521,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	106,188,600
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	50,750,000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	37	8,624,822,000
02.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6	2,236,950,000
02.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	150,000,000
02.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5	2,063,025,000
02.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2	83,400,000
02.13.24	Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan	4	268,044,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	3,497,717,600
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	219,704,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	22,946,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	83,035,400
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	6,900,000,000
02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4	897,200,000
02.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	2	91,540,000
02.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2	335,965,000
02.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	4	510,605,000
02.18.19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5	1,038,330,500
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,578,735,500
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	2,214,605,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	127,247,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	105,772,000
5.01.03	Biro Kesejahteraan Sosial	27	63,674,697,000
05.01.16	Program Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	1	250,000,000
05.01.17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	700,000,000
05.01.19	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	100,000,000
05.01.20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	17,758,979,000
05.01.21	Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	1	327,360,000
05.01.22	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	2	350,000,000
05.01.35	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	4	700,000,000
05.01.38	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	5	38,339,208,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.01.39	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	3	1,150,000,000
05.01.40	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	800,000,000
05.01.47	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial	3	2,985,750,000
05.04.32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	213,400,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan	88	28,186,766,000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42	7,750,000,000
02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	7	2,721,400,000
02.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3	285,000,000
02.01.17	Program Pengembangan Kewirusahaan	1	142,500,000
02.01.18	Program Pengembangan data dan informasi	2	290,000,000
02.01.19	Program Pengembangan Hubungan Industrial	3	298,745,000
02.01.20	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	3	520,000,000
02.01.21	Program Pembinaan dan Pengujian K3	2	275,000,000
03.08.15	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	1	200,000,000
03.08.18	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	3	375,000,000
03.08.19	Program Pengembangan Kawasan KTM	2	250,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,881,445,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	460,910,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	50,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	718,766,000
02.02.16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	1	599,841,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	118,925,000
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	900,000,000
02.08.25	Program Koordinasi Program Keluarga Berencana	3	900,000,000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	39	16,268,000,000
02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3	6,677,025,000
02.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3	485,000,000
02.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6	3,275,600,000
02.07.20	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN DESA, ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN DESA	2	2,274,400,000
02.07.21	PROGRAM PEMANTAPAN KOORDINASI PROG. KHUSUS LINTAS SEKTORAL	2	350,000,000
02.07.22	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA, DAN LH	4	1,050,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,458,561,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	393,333,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	84,081,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	220,000,000
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	2,000,000,000
02.11.19	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	1	2,000,000,000
5.01.03	Biro Kesejahteraan Sosial	1	550,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.01.22	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	1	550,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
4	Pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional	270	94,805,000,000
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	44	5,000,000,000
02.03.15	Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	26	3,932,808,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	784,505,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	229,900,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	5,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	47,787,000
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	52	38,504,000,000
03.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2	3,199,500,000
03.01.16	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	2	1,179,840,000
03.01.17	Program pengembangan budidaya perikanan	10	1,725,800,000
03.01.18	Program pengembangan perikanan tangkap	8	25,566,052,000
03.01.19	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	10	1,600,000,000
03.01.20	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2	550,380,000
03.01.21	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	2	823,130,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	3,200,300,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	433,998,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	225,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	71	36,513,000,000
03.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	3	426,400,000
03.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	19	6,121,031,000
03.03.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	10	1,506,803,000
03.03.26	Program Peningkatan Pelayanan Mutu	4	697,700,000
03.03.31	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	140,000,000
03.03.32	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	4	11,590,000,000
03.03.33	Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	740,000,000
03.03.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	2	335,000,000
03.03.35	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	5,963,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	3,434,220,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,382,636,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	326,210,000
05.04.33	Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	3	3,850,000,000
3.03.02	Dinas Perkebunan dan Peternakan	103	14,788,000,000
03.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	17	3,973,000,000
03.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2	175,000,000
03.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	9	1,975,000,000
03.03.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	14	616,000,000
03.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	7	3,953,345,000
03.03.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	5	147,600,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25	3,164,969,900
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	292,685,100
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	35,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18	455,400,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
5	Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	166	34,188,165,000
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	42	6,700,000,000
02.11.15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	1,666,080,000
02.11.16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	3	750,000,000
02.11.20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	3	565,298,000
02.11.21	Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5	484,982,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,113,000,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	1,474,734,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	120,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	295,306,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	230,600,000
3.02.01	Dinas Pariwisata	36	15,650,000,000
03.02.15	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	4	665,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
03.02.16	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK	1	95,000,000
03.02.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA	2	72,600,000
03.02.18	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	6,830,700,000
03.02.19	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	4,625,810,000
03.02.20	Program Pengembangan Kemitraan	6	1,303,500,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	2,007,390,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	50,000,000
3.06.01	Dinas Perdagangan	53	6,050,000,000
03.06.25	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6	745,800,000
03.06.27	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6	1,924,600,000
03.06.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur	3	193,400,000
03.06.29	Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung	2	372,600,000
03.06.30	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	6	697,275,000
03.06.31	Program Pengembangan dan Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang	2	219,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,076,500,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	365,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	70,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	280,225,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	105,000,000
3.07.01	Dinas Perindustrian	35	5,788,165,000
03.07.15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	8	2,139,606,000
03.07.23	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	8	1,838,132,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,187,721,900

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	119,790,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	432,050,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	70,865,100

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
6	Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur	722	334,820,442,000
1.03.02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	7,000,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	7,000,000,000
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	2,740,919,000
02.06.15	Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	3	1,837,919,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	576,200,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	326,800,000
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	58	16,800,000,000
02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11	971,150,000
02.10.18	Program kerjasama informasi dan media massa	5	4,023,777,000
02.10.20	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	5,260,800,000
02.10.23	Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi	2	338,622,000
02.10.24	Program Kerjasama Antar Lembaga	1	29,997,500
02.14.15	Program Pengembangan Data/Informasi	2	123,207,000
02.15.02	Pengamanan Informasi Rahasia	2	433,481,000
02.15.03	Pengamanan Jaringan Komunikasi Sandi	2	244,537,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	3,591,145,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	939,937,200

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	142,129,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	433,385,000
05.04.31	Program Ketatalaksanaan	1	267,831,500
3.07.01	Dinas Perindustrian	2	461,835,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	369,500,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	92,335,000
4.01.01	Inspektorat	39	8,000,000,000
04.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	19	6,342,149,450
04.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	2	63,223,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,056,636,350
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	209,741,180
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	264,950,020
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	63,300,000
4.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73	15,431,300,000
01.03.16	Program Perencanaan Tata Ruang	1	150,000,000
04.02.15	Program Pengembangan data/informasi	4	685,200,000
04.02.16	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4	696,200,000
04.02.19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	400,000,000
04.02.22	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	65,000,000
04.02.25	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	280,000,000
04.02.31	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	12	2,783,250,000
04.02.33	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	6	1,592,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
04.02.34	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	9	1,124,000,000
04.02.35	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1,557,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,858,790,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,468,410,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	290,000,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	10	2,349,450,000
05.04.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	132,000,000
4.03.01	Badan Keuangan Daerah	46	8,961,338,000
04.03.16	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	12	2,613,509,000
04.03.17	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	6	993,663,000
04.03.18	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	7	1,998,793,000
04.03.26	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD	3	594,790,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,973,545,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	562,038,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	125,000,000
4.03.03	Badan Pendapatan Daerah	56	37,600,000,000
04.03.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	874,000,000
04.03.21	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	11	3,130,000,000
04.03.22	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	4	820,018,120
04.03.23	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	9	6,569,950,600
04.03.24	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	3	1,193,679,500

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
04.03.25	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	2,200,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	10,781,401,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	10,988,950,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	476,999,980
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	565,000,000
4.04.01	Badan Kepegawaian Daerah	43	7,450,000,000
04.04.16	Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah	3	475,125,000
04.04.17	Program Pendidikan Kedinasan	1	160,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	1,730,554,148
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	447,097,852
05.04.18	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	1	136,045,200
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	54,390,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	298,890,000
05.04.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14	4,147,897,800
4.05.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	41	9,000,000,000
04.05.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11	4,726,767,000
04.05.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5	623,882,600
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	2,270,167,600
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	1,055,619,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	97,387,400
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	226,176,400

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
4.06.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	34	4,600,000,000
04.06.15	Penelitian dan Pengembangan	15	3,333,300,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	751,912,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	168,100,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	53,200,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	140,588,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	152,900,000
4.07.01	Badan Penghubung	26	13,048,000,000
04.07.15	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	656,500,000
04.07.16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja Bagian Umum	1	1,200,000,000
04.07.18	Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah	1	174,030,000
04.07.19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	190,000,000
04.07.20	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	688,847,500
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	2,712,577,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	4,666,833,500
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	40,800,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	323,911,500
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	2,394,499,700
5.01.01	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	26	4,509,600,000
05.01.24	Program pembinaan & Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	98,200,000
05.01.26	Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah	3	385,000,000
05.01.34	Program Pengembangan Data / Informasi	3	991,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.01.43	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1	100,000,000
05.01.44	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2	405,000,000
05.01.45	Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	80,000,000
05.01.53	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	4	528,400,000
05.01.56	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2	138,200,000
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	6	1,271,282,000
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	269,318,000
05.04.35	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	243,200,000
5.01.02	Biro Hukum	11	2,050,000,000
05.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	270,500,000
05.01.23	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	165,122,000
05.01.25	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	7	1,614,378,000
5.01.04	Biro Perekonomian	17	1,966,200,000
05.01.29	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	6	515,000,000
05.01.30	Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah	4	329,000,000
05.01.32	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	234,000,000
05.01.33	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1	84,000,000
05.01.35	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	3	729,200,000
05.01.36	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan	1	75,000,000
5.01.05	Biro Pembangunan Daerah	37	5,266,200,000
05.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	554,900,000
05.01.29	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	1	160,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.01.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	10	1,183,600,000
05.01.57	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	1	500,000,000
05.01.58	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa	2	331,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,327,000,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	226,750,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	676,095,000
05.04.35	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	256,855,000
5.01.06	Biro Perlengkapan	29	19,107,250,000
05.01.55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20	7,344,664,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	1,685,000,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	8,956,250,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	1,121,336,000
5.01.07	Biro Umum	49	56,483,000,000
05.01.51	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	1	375,000,000
05.01.52	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1	300,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	27,623,144,350
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	12,380,000,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	250,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	200,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	325,000,000
05.04.28	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	250,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	6,768,320,000
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	9	7,811,535,650
05.04.31	Program Ketatalaksanaan	1	200,000,000
5.01.08	Biro Organisasi	39	4,069,200,000
05.01.27	Program Penataan Kelembagaan	4	478,600,000
05.01.28	Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur	3	637,800,000
05.03.15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan	6	1,027,314,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	790,463,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	126,250,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	135,136,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	70,837,000
05.04.31	Program Ketatalaksanaan	6	463,600,000
05.04.32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	339,200,000
5.01.09	Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik	19	10,275,600,000
05.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	4	1,714,740,000
05.01.41	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	268,500,000
05.01.42	Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung	4	3,535,000,000
05.01.49	Program kerjasama informasi dan media massa	2	807,000,000
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1	1,036,575,300
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	7	2,913,784,700
5.02.01	Sekretariat DPRD	61	100,000,000,000
05.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14	66,548,817,200
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	15,120,880,300

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	6,587,251,800
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1,210,750,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	2,362,534,600
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	2,929,744,800
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	6	5,240,021,300

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
7	Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif	102	35,336,231,000
1.05.01	Satpol PP	44	28,186,231,000
01.05.21	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	4	703,933,000
01.05.22	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4	377,202,000
01.05.23	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	9	4,675,923,800
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	21,382,825,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	588,110,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	27,837,500
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	265,065,700
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	165,333,200
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	3,950,000,000
02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi-	5	1,534,600,000
02.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4	461,800,000
02.12.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	5	639,200,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,189,736,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	109,664,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	15,000,000
6.01.01	Badan Kesbangpol	33	3,200,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	934,100,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	140,382,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	8,350,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	20,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	228,468,000
06.01.15	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	3	400,000,000
06.01.18	Program Penanganan Konflik	2	398,000,000
06.01.20	Program Pengendalian Stabilitas Daerah	3	570,700,000
06.01.21	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	5	500,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
8	Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan kesiagaan penanggulangan bencana	141	48,219,000,000
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana	36	3,500,000,000
01.05.18	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	704,600,000
01.05.19	Program Kedaruratan dan Logistik	4	404,650,000
01.05.20	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	393,900,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,285,859,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	285,603,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	73,688,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	170,200,000
05.04.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2	181,500,000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	34	4,300,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	1,833,500,000
02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	110,000,000
02.05.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	1	110,000,000
02.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	462,190,300
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,336,559,700
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	175,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	140,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	132,750,000
3.04.01	Dinas Kehutanan	38	22,050,000,000
03.04.15	Program rehabilitasi hutan dan lahan	4	3,150,000,000
03.04.16	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3	1,170,000,000
03.04.19	Program perencanaan dan pengembangan hutan	8	5,506,000,000
03.04.21	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	9	8,550,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,501,300,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,942,700,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	150,000,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	80,000,000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33	18,369,000,000
03.05.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	5	440,000,000
03.05.16	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2	13,578,000,000
03.05.17	Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan	2	225,000,000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
03.05.18	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif	1	1,291,000,000
03.05.20	Peningkatan Kapasitas sistem Pelaporan dan Evaluasi	1	70,000,000
03.05.21	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan Geologi	4	300,000,000
03.05.22	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	2	110,000,000
03.05.24	Program Pendidikan Masyarakat	4	350,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	1,804,299,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	200,701,000

Tabel IV-6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Proritas Pembangunan Nasional

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
1	PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2	6,453,080,000
01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	7,450,864,000
01.01.17	Program Pendidikan Menengah	9	134,208,882,000
01.01.18	Program Pendidikan Luar Biasa	2	4,484,400,000
01.01.19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	19,949,194,400
01.01.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7	11,192,420,400
01.01.22	Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	4	1,000,000,000
01.01.23	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	1,460,039,500
01.01.24	Program Pendidikan Tinggi	1	12,110,000,000
01.01.25	Program Kegiatan Belajar Mengajar	1	67,222,996,800
02.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1,521,215,000
02.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	2,468,081,900
02.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	983,500,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	4,009,914,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,515,019,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	2,844,643,000
1.02.01	Dinas Kesehatan		
01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	4,975,293,000
01.02.17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	639,078,000
01.02.19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	12,953,446,000
01.02.21	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	3,881,845,000
01.02.23	Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	2	866,932,000
01.02.28	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	3	45,361,504,550
01.02.30	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	4	1,256,054,000
01.02.33	Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	1,884,966,000
01.02.36	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	258,320,000
01.02.37	Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	3	13,323,435,000
01.02.38	Program Pemberantasan Penyakit	1	5,589,774,000
01.02.39	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	1,748,181,000
01.02.41	Program Promosi Kesehatan	2	1,252,200,000
01.02.42	Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	1	144,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	6,865,561,850
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	28,152,869,600
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	137,224,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	208,716,000
1.02.02	Rumah Sakit Abdul Moeloek		
01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6	117,213,258,150

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
01.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	16,928,292,850
01.02.32	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	174,271,000,000
01.02.34	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	700,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	5,492,950,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	735,499,000
1.02.03	Rumah Sakit Jiwa		
01.02.17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	158,572,500
01.02.18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	49,600,000
01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6	10,215,400,000
01.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	507,600,000
01.02.28	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	3	2,236,415,000
01.02.30	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan	1	559,930,000
01.02.32	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1	10,439,835,500
01.02.34	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	28,750,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	2,196,203,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	725,250,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	400,750,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	181,694,000
1.06.01	Dinas Sosial		

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
01.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	200,000,000
01.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	646,000,000
01.06.17	Program pembinaan anak terlantar	4	2,861,962,000
01.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	1,168,000,000
01.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	1,365,520,500
01.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	435,559,000
01.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2	1,450,000,000
01.06.22	Program Keluarga Harapan	1	125,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,231,005,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	146,953,500
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	170,000,000
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
02.02.15	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	3	1,545,743,000
02.02.16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	5	1,694,390,500
02.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	26,885,000
02.02.18	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	101,250,000
02.02.19	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	2	418,450,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	1,591,055,900
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	346,521,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	106,188,600
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	50,750,000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga		
02.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6	2,236,950,000
02.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	150,000,000
02.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5	2,063,025,000
02.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2	83,400,000
02.13.24	Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan	4	268,044,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	3,497,717,600
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	219,704,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	22,946,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	83,035,400
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4	897,200,000
02.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	2	91,540,000
02.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2	335,965,000
02.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	4	510,605,000
02.18.19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5	1,038,330,500
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	1,578,735,500
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	2,214,605,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	127,247,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	105,772,000
5.01.03	Biro Kesejahteraan Sosial		
05.01.16	Program Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	1	250,000,000
05.01.17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	700,000,000
05.01.19	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	100,000,000
05.01.20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	1	17,758,979,000
05.01.21	Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	1	327,360,000
05.01.22	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	2	350,000,000
05.01.35	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	4	700,000,000
05.01.38	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	5	38,339,208,000
05.01.39	Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya	3	1,150,000,000
05.01.40	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	800,000,000
05.01.47	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial	3	2,985,750,000
05.04.32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	213,400,000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan	7	2,721,400,000
02.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3	285,000,000
02.01.17	Program Pengembangan Kewirusahaan	1	142,500,000
02.01.18	Program Pengembangan data dan informasi	2	290,000,000
02.01.19	Program Pengembangan Hubungan Industrial	3	298,745,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
02.01.20	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	3	520,000,000
02.01.21	Program Pembinaan dan Pengujian K3	2	275,000,000
03.08.15	Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi	1	200,000,000
03.08.18	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	3	375,000,000
03.08.19	Program Pengembangan Kawasan KTM	2	250,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,881,445,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	460,910,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	50,000,000
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
02.02.16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual	1	599,841,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	118,925,000
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
02.08.25	Program Koordinasi Program Keluarga Berencana	3	900,000,000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3	6,677,025,000
02.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3	485,000,000
02.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6	3,275,600,000
02.07.20	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN DESA, ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN DESA	2	2,274,400,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
02.07.21	PROGRAM PEMANTAPAN KOORDINASI PROG. KHUSUS LINTAS SEKTORAL	2	350,000,000
02.07.22	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA, DAN LH	4	1,050,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,458,561,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	393,333,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	84,081,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	220,000,000
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
02.11.19	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	1	2,000,000,000
5.01.03	Biro Kesejahteraan Sosial		
05.01.22	Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	1	550,000,000
TOTAL		406	874,482,769,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
2	SEKTOR UNGGULAN		
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan		
02.03.15	Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	26	3,932,808,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	784,505,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	229,900,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	5,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	47,787,000
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan		
03.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2	3,199,500,000
03.01.16	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	2	1,179,840,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
03.01.17	Program pengembangan budidaya perikanan	10	1,725,800,000
03.01.18	Program pengembangan perikanan tangkap	8	25,566,052,000
03.01.19	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	10	1,600,000,000
03.01.20	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2	550,380,000
03.01.21	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	2	823,130,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	3,200,300,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	433,998,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	225,000,000
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura		
03.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	3	426,400,000
03.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	19	6,121,031,000
03.03.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	10	1,506,803,000
03.03.26	Program Peningkatan Pelayanan Mutu	4	697,700,000
03.03.31	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	140,000,000
03.03.32	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani	4	11,590,000,000
03.03.33	Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	740,000,000
03.03.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	2	335,000,000
03.03.35	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	5,963,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	3,434,220,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,382,636,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	326,210,000
05.04.33	Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	3	3,850,000,000
3.03.02	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
03.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	17	3,973,000,000
03.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2	175,000,000
03.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	9	1,975,000,000
03.03.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	14	616,000,000
03.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	7	3,953,345,000
03.03.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	5	147,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25	3,164,969,900
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	292,685,100
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	35,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18	455,400,000
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
02.11.15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	1,666,080,000
02.11.16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	3	750,000,000
02.11.20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	3	565,298,000
02.11.21	Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5	484,982,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,113,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	1,474,734,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	120,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	295,306,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	230,600,000
3.02.01	Dinas Pariwisata		
03.02.15	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	4	665,000,000
03.02.16	PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK	1	95,000,000
03.02.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA	2	72,600,000
03.02.18	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	6,830,700,000
03.02.19	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	4,625,810,000
03.02.20	Program Pengembangan Kemitraan	6	1,303,500,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	2,007,390,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	50,000,000
3.06.01	Dinas Perdagangan		
03.06.25	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6	745,800,000
03.06.27	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6	1,924,600,000
03.06.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur	3	193,400,000
03.06.29	Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung	2	372,600,000
03.06.30	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	6	697,275,000
03.06.31	Program Pengembangan dan Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang	2	219,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,076,500,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	365,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	70,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	280,225,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	105,000,000
3.07.01	Dinas Perindustrian		
03.07.15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	8	2,139,606,000
03.07.23	Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	8	1,838,132,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,187,721,900
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	119,790,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	432,050,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	70,865,100
TOTAL		436	128,993,165,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
3	PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH		
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32	451,597,582,500
01.03.21	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30	123,960,650,000
01.03.26	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	2	3,011,438,000
01.03.28	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	8	3,256,959,000
01.03.40	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	2	6,775,952,400
01.03.41	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	5	1,485,000,000
01.03.43	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	5	2,753,312,000
01.03.45	Pembangunan Jalan-jalan Strategis	3	29,526,774,500

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
01.03.46	Program Perencanaan Tata Ruang	4	3,100,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	10,757,796,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	2,100,788,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	146,971,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	33,657,010,600
1.03.02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
01.03.29	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11	47,795,545,000
01.03.32	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	23,700,000,000
01.03.33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3	900,000,000
01.03.34	Program pengendalian banjir	5	8,650,000,000
01.03.35	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3	2,400,000,000
01.03.36	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4	2,250,000,000
01.04.15	Program Pengembangan Perumahan	4	2,050,000,000
01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9	7,850,000,000
01.04.21	Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	5	126,780,000,000
01.04.23	Program Pengembangan Data/Informasi	1	1,088,600,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	10,283,455,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,920,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	150,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	182,400,000
2.09.01	Dinas Perhubungan		
02.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6	1,062,800,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
02.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	500,000,000
02.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	4	1,918,600,000
02.09.18	Program Pendidikan Non Formal	5	385,000,000
02.09.20	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3	1,062,680,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	3,283,120,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	437,800,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	250,000,000
4.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
01.03.16	Program Perencanaan Tata Ruang	1	208,200,000
04.02.33	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1	200,000,000
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana		
01.05.18	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	704,600,000
01.05.19	Program Kedaruratan dan Logistik	4	404,650,000
01.05.20	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	393,900,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,285,859,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	285,603,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	73,688,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	170,200,000
05.04.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2	181,500,000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup		
02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	1,833,500,000
02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	110,000,000
02.05.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	1	110,000,000
02.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	462,190,300

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1,336,559,700
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	175,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	140,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	132,750,000
3.04.01	Dinas Kehutanan		
03.04.15	Program rehabilitasi hutan dan lahan	4	3,150,000,000
03.04.16	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3	1,170,000,000
03.04.19	Program perencanaan dan pengembangan hutan	8	5,506,000,000
03.04.21	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	9	8,550,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,501,300,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1,942,700,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	150,000,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	1	80,000,000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
03.05.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	5	440,000,000
03.05.16	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2	13,578,000,000
03.05.17	Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan	2	225,000,000
03.05.18	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif	1	1,291,000,000
03.05.20	Peningkatan Kapasitas sistem Pelaporan dan Evaluasi	1	70,000,000
03.05.21	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan Geologi	4	300,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
03.05.22	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	2	110,000,000
03.05.24	Program Pendidikan Masyarakat	4	350,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	1,804,299,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	200,701,000
TOTAL		381	965,657,434,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
4	KONDISI PERLU (PENEGAKAN HUKUM, KEAMANAN KETERTIBAN, DEMOKRASI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI)		
1.03.02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	7,000,000,000
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
02.06.15	Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	3	1,837,919,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	576,200,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	326,800,000
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11	971,150,000
02.10.18	Program kerjasama informasi dan media massa	5	4,023,777,000
02.10.20	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	5,260,800,000
02.10.23	Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi	2	338,622,000
02.10.24	Program Kerjasama Antar Lembaga	1	29,997,500
02.14.15	Program Pengembangan Data/Informasi	2	123,207,000
02.15.02	Pengamanan Informasi Rahasia	2	433,481,000
02.15.03	Pengamanan Jaringan Komunikasi Sandi	2	244,537,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	3,591,145,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	939,937,200
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	142,129,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	433,385,000
05.04.31	Program Ketatalaksanaan	1	267,831,500
3.07.01	Dinas Perindustrian		
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	369,500,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	92,335,000
4.01.01	Inspektorat		
04.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	19	6,342,149,450
04.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	2	63,223,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1,056,636,350
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	209,741,180
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	264,950,020
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	63,300,000
4.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
01.03.16	Program Perencanaan Tata Ruang	1	150,000,000
04.02.15	Program Pengembangan data/informasi	4	685,200,000
04.02.16	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4	696,200,000
04.02.19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	400,000,000
04.02.22	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	65,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
04.02.25	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	280,000,000
04.02.31	Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	12	2,783,250,000
04.02.33	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	6	1,592,000,000
04.02.34	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	9	1,124,000,000
04.02.35	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1,557,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1,858,790,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1,468,410,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	290,000,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	10	2,349,450,000
05.04.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	132,000,000
4.03.01	Badan Keuangan Daerah		
04.03.16	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	12	2,613,509,000
04.03.17	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	6	993,663,000
04.03.18	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	7	1,998,793,000
04.03.26	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD	3	594,790,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,973,545,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	562,038,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	125,000,000
4.03.03	Badan Pendapatan Daerah		
04.03.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	874,000,000
04.03.21	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	11	3,130,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
04.03.22	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	4	820,018,120
04.03.23	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	9	6,569,950,600
04.03.24	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	3	1,193,679,500
04.03.25	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	2,200,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	10,781,401,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	10,988,950,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	476,999,980
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	565,000,000
4.04.01	Badan Kepegawaian Daerah		
04.04.16	Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah	3	475,125,000
04.04.17	Program Pendidikan Kedinasan	1	160,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17	1,730,554,148
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	447,097,852
05.04.18	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	1	136,045,200
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	54,390,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	298,890,000
05.04.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14	4,147,897,800
4.05.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah		
04.05.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11	4,726,767,000
04.05.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5	623,882,600
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	2,270,167,600

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	1,055,619,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	97,387,400
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	226,176,400
4.06.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
04.06.15	Penelitian dan Pengembangan	15	3,333,300,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	751,912,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	168,100,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	53,200,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	140,588,000
05.04.25	Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	2	152,900,000
4.07.01	Badan Penghubung		
04.07.15	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1	656,500,000
04.07.16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja Bagian Umum	1	1,200,000,000
04.07.18	Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah	1	174,030,000
04.07.19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	190,000,000
04.07.20	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	688,847,500
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	2,712,577,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	4,666,833,500
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	40,800,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	323,911,500

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	2,394,499,700
5.01.01	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
05.01.24	Program pembinaan & Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	98,200,000
05.01.26	Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah	3	385,000,000
05.01.34	Program Pengembangan Data / Informasi	3	991,000,000
05.01.43	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1	100,000,000
05.01.44	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2	405,000,000
05.01.45	Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	80,000,000
05.01.53	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	4	528,400,000
05.01.56	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2	138,200,000
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	6	1,271,282,000
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	269,318,000
05.04.35	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	243,200,000
5.01.02	Biro Hukum		
05.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	270,500,000
05.01.23	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	165,122,000
05.01.25	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	7	1,614,378,000
5.01.04	Biro Perekonomian		
05.01.29	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	6	515,000,000
05.01.30	Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah	4	329,000,000
05.01.32	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	234,000,000
05.01.33	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1	84,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.01.35	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro	3	729,200,000
05.01.36	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan	1	75,000,000
5.01.05	Biro Pembangunan Daerah		
05.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	554,900,000
05.01.29	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan	1	160,000,000
05.01.31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	10	1,183,600,000
05.01.57	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	1	500,000,000
05.01.58	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa	2	331,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1,327,000,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	226,750,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	676,095,000
05.04.35	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	256,855,000
5.01.06	Biro Perlengkapan		
05.01.55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20	7,344,664,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	1,685,000,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	8,956,250,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	1,121,336,000
5.01.07	Biro Umum		
05.01.51	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	1	375,000,000
05.01.52	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1	300,000,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	27,623,144,350

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	12,380,000,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	250,000,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	200,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	325,000,000
05.04.28	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	250,000,000
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	6,768,320,000
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	9	7,811,535,650
05.04.31	Program Ketatalaksanaan	1	200,000,000
5.01.08	Biro Organisasi		
05.01.27	Program Penataan Kelembagaan	4	478,600,000
05.01.28	Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur	3	637,800,000
05.03.15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan	6	1,027,314,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	790,463,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	126,250,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	135,136,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	70,837,000
05.04.31	Program Ketatalaksanaan	6	463,600,000
05.04.32	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	339,200,000
5.01.09	Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik		
05.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	4	1,714,740,000
05.01.41	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	268,500,000
05.01.42	Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung	4	3,535,000,000
05.01.49	Program kerjasama informasi dan media massa	2	807,000,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
05.04.29	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1	1,036,575,300
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	7	2,913,784,700
5.02.01	Sekretariat DPRD		
05.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14	66,548,817,200
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	15,120,880,300
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	6,587,251,800
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1,210,750,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	2,362,534,600
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	2,929,744,800
05.04.30	Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	6	5,240,021,300
1.05.01	Satpol PP		
01.05.21	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	4	703,933,000
01.05.22	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4	377,202,000
01.05.23	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	9	4,675,923,800
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	21,382,825,800
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	588,110,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	27,837,500
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	265,065,700
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	165,333,200
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi-	5	1,534,600,000
02.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4	461,800,000

KODE	DIMENSI	JUMLAH KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TH. 2017
02.12.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	5	639,200,000
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	1,189,736,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	109,664,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	15,000,000
6.01.01	Badan Kesbangpol		
05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	934,100,000
05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	140,382,000
05.04.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	8,350,000
05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	20,000,000
05.04.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	228,468,000
06.01.15	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	3	400,000,000
06.01.18	Program Penanganan Konflik	2	398,000,000
06.01.20	Program Pengendalian Stabilitas Daerah	3	570,700,000
06.01.21	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	5	500,000,000
TOTAL		824	370,156,673,000

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- Penerimaan Pembiayaan, dan
- Pengeluaran Pembiayaan

Tabel IV-7 Pembiayaan Daerah dalam Struktur APBD Tahun 2017

	Pembiayaan Daerah	79,143,083,000.00
	Penerimaan Pembiayaan	84,143,083,000.00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84,143,083,000.00
	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00
	Pembiayaan Netto	79,143,083,000.00

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis. Sementara Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menambah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka jumlah pembiayaan *netto* digunakan untuk menutup defisit APBD.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Tabel IV-8 Pembiayaan Daerah dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2017

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84,143,083,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83,143,083,000,00

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya mengacu pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyemodal tersebut.

Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi dan memperluas skala ekonomi unit usaha, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel IV-9 Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2017

PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000,00

BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.

Bandar Lampung, November 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO, M.Si.